



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP 2012-2017

time to invest

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
KABUPATEN BULELENG**

*Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja
Telp/Fax: (0362) 22063
email: dpmptsp@bulelengkab.go.id*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2012-2017 dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 bertujuan memberikan informasi kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan yang memberikan informasi tentang keberhasilan ataupun kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kinerja. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2012-2017. Laporan ini juga disusun sebagai syarat evaluasi dan analisa terhadap pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada rencana strategis SKPD, selama tahun anggaran berjalan. Sehingga dapat dilihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Dengan segala keterbatasan yang ada, semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2012-2017. Laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat positif guna penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan laporan yang representatif.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,

I Putu Karuna, SH
Pembina Tk. I
NIP.19660602 199403 1 011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.4. Isu Strategis.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. Perencanaan Strategis	17
2.2. Indikator Penetapan Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP.....	56
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar PNS Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 1.2	Daftar PNS Berdasarkan Jabatan.....	5
Tabel 1.3	Daftar PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012-2016	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017	25
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Tahun 2012-2017	27
Tabel 3.1	Rekap Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari Tahun 2012-2017.....	29
Tabel 3.2	Rekap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	30
Tabel 3.3	Rekap Perbandingan Capaian Kinerja Indikator % Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan Tahun 2012-2017	31
Tabel 3.4	Data IKM Tahun 2012-2017	33
Tabel 3.5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2012-2017	34
Tabel 3.6	Data Realisasi Investasi Tahun 2017	35
Tabel 3.7	Data Realisasi Investasi Tahun 2012-2017	36
Tabel 3.8	Data Realisasi Investasi Tahun 2017	36
Tabel 3.9	Rekap Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2012-2017	38
Tabel 3.10	Rekap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2012-2017	39
Tabel 3.11	Rekap Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tahun 2012-2017.....	39
Tabel 3.12	Rekap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2012-2017	40
Tabel 3.13	Rekap Capaian Program Penyusunan Anggaran SKPD Tahun 2012-2017	40
Tabel 3.14	Rekap Capaian Program Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2012-2017	41
Tabel 3.15	Rekap Capaian Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun 2012-2017	42
Tabel 3.16	Rekap Data Izin Terbit Tahun 2013-2017	42
Tabel 3.17	Rekap Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013-2017	45
Tabel 3.18	Rekap Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2013-2017	46
Tabel 3.19	Rekap Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2013-2017	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	7
Gambar 1.2 Alur/Skema Pengurusan Permohonan Perizinan	11
Gambar 1.3 Alur/Skema Pengaduan	13
Gambar 3.1 Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari Tahun 2012-2017	29
Gambar 3.2 Diagram Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai IKM Tahun 2012-2017 ...	33
Gambar 3.3 Grafik Target, Realisasi dan Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2017	45

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017 menyajikan hasil-hasil kinerja yang dicapai selama tahun 2012-2017 sebagai bahan evaluasi di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan visi dan misi, yang harus mendapat perhatian secara terus menerus, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Pada LKjIP juga dianalisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017. Pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Laporan ini yang memuat permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja selama 5 tahun yaitu tahun 2012-2017, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta analisis permasalahan dan solusi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempersiapkan terwujudnya sistem pelaporan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sekaligus mempersiapkan organisasi pembelanjaan yang merupakan paradigma baru bagi birokrasi seiring dengan meningkatnya perkembangan arus informasi dan teknologi. Evaluasi dan analisa juga disertakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan dan hasilnya digunakan untuk melakukan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya dengan lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada mulanya Pelayanan Perizinan dilakukan oleh beberapa SKPD/Unit Kerja Teknis. Sehingga pemohon dalam mengurus perizinannya harus melalui beberapa pintu dan di beberapa kantor. Kondisi demikian tentu memerlukan banyak waktu dan tidak efisien. Atas dasar itu maka langkah progresif yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi kondisi demikian adalah dengan mempercepat dan menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam satu SKPD. Sehingga terbitlah payung hukum Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Status organisasi saat itu masih berbentuk Kantor, yang dalam sebutannya Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Buleleng. Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, KPT diberikan wewenang dalam mengelola 29 jenis perizinan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng. Seiring dengan Perkembangan Pemerintahan serta kebutuhan akan pelayanan yang sangat dinamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng meningkatkan status dan kewenangan Organisasi KPT menjadi setingkat Badan, dan sebutan namanya berubah menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Buleleng dengan dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng, Tahun 2013 Nomor 11). Beberapa jenis perizinan yang masuk dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata kewenangan perizinannya menjadi tanggung jawab BPPT Kabupaten Buleleng, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 18 Tahun 2015. Pada tanggal 6 Januari 2017 adanya perubahan Badan menjadi Dinas dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan. Pemberian tugas ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan perizinan dan non perizinan serta memberikan kepastian berusaha bagi investor.



Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta bebas dari KKN telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKjIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP yang baik harus didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. LKjIP berisikan rencana, target, capaian dan realisasi anggaran sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat laporan yang baik jika kinerja instansi tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja. LKjIP bisa digunakan untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng, Tahun 2013 Nomor 11)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng
11. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kondisi Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di urusan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B sesuai

dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan.

1.3.3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.3.4. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal
 - b) Kepala Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

- a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
- b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
- 6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
- 7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a) Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
 - b) Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2017 berjumlah 89 orang, dengan komposisi PNS sebanyak 34 orang, Honor Daerah 2 orang, dan Tenaga Kontrak 53 orang. Data PNS diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, sebagai berikut

1) Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1 Daftar PNS Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
2	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1	2
3	Pengatur (II/c)	2	2	4
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
5	Penata Muda (III/a)	3	2	5
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	4	2	6
7	Penata (III/c)	2	1	3
8	Penata Tk. I (III/d)	5	2	7
9	Pembina (IV/a)	2	1	3
10	Pembina Tk. I (IV/b)	2	-	2
11	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
TOTAL :		22	12	34

2) Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Daftar PNS Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	1	6
3	Eselon IV	7	5	12
4	Staf	9	6	15
TOTAL :		22	12	34

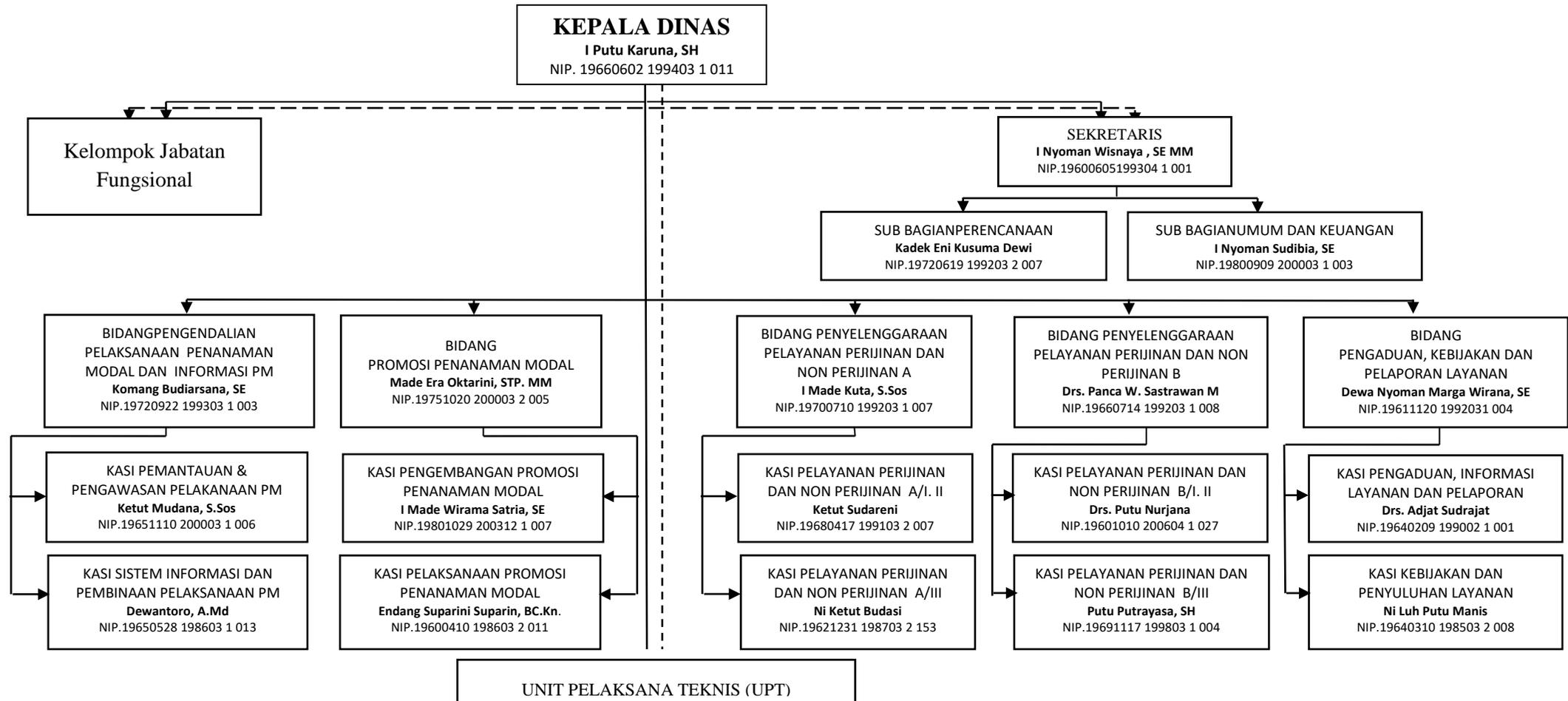
3) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.3 Daftar PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jml
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	5	2	2	-	-	10
3	Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	-	4	-	-	-	-	4
4	Bidang Promosi Penanaman Modal	1	2	-	1	-	-	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	-	2	-	5	-	-	7
6	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	-	4	-	-	-	-	4
7	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	-	3	-	1	-	-	4
	TOTAL	2	21	2	9	-	-	34

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada gambar berikut.

Nomor : 75 Tahun 2016
 Tanggal : 28 Desember 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



1.3.5. Kondisi Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang mulanya adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan koordinasi bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian.

Seiring dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka BPPT berubah status dari Badan menjadi Dinas per tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan penambahan kewenangan di bidang penanaman modal. Jumlah izin yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan PPSTP juga menjadi bertambah, dari yang awalnya menangani 33 (tiga puluh tiga) jenis izin, sekarang menjadi menangani 42 (empat puluh dua) jenis izin terbagi menjadi 13 (tiga belas) izin bidang A dan 29 (dua puluh sembilan) izin bidang B.

a. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

Izin yang berbayar terdiri dari 5 (lima) izin yaitu:

1. Pajak Reklame
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4. Izin Gangguan (HO)
5. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Sedangkan izin yang tidak berbayar terdiri dari :

6. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
7. Izin Lokasi
8. Izin Prinsip adalah Pemberian Izin untuk mendirikan bangunan;
9. Izin Prinsip Penanaman Modal;
10. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
11. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
12. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
13. Izin Prinsip Persetujuan Penanaman Modal;

b. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B

Izin yang berbayar terdiri dari 5 (lima) izin yaitu:

1. Izin Trayek

Izin yang tidak berbayar terdiri dari 28 izin yaitu:

2. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan (IUA)
3. Izin Usaha Industri (IUI)
4. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
5. Izin Penyediaan Daging
6. Izin Pemotongan Hewan
7. Izin Pengadaan dan Pembelian Daun Tembakau Hijau dan Tembakau Kerosok.
8. Izin Penyosohan Beras
9. Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak
10. Izin Pengangkutan Kayu Rakyat
11. Legalisir Izin Perndirian Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
12. Surat Izin Tempat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SITU-MB)
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
16. TDUP Usaha Perjalanan Wisata
17. TDUP Penyediaan Jasa Akomodasi
18. TDUP Jasa Makanan dan Minuman
19. TDUP Kawasan Pariwisata
20. TDUP Jasa Transportasi Wisata
21. TDUP Daya Tarik Wisata
22. TDUP Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
23. TDUP Jasa Pramuwisata
24. TDUP Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
25. TDUP Jasa Konsultan Pariwisata
26. TDUP Jasa Informasi Pariwisata
27. TDUP Wisata Tirta
28. TDUP SPA
29. Izin Kesehatan

Secara garis besar, prosedur dan proses dalam pengurusan permohonan ijin adalah sebagai berikut.

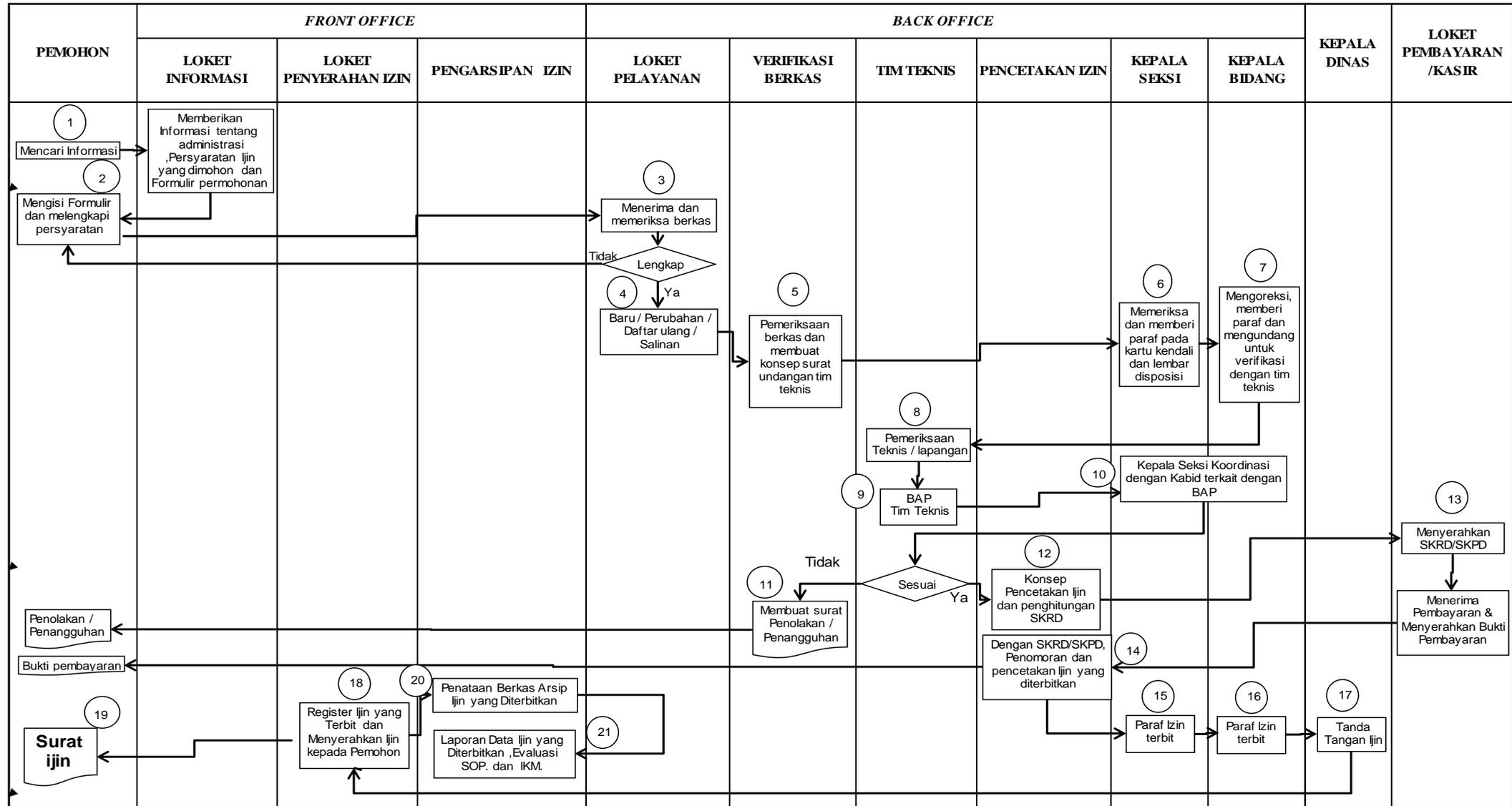
1. Pemohon mencari informasi pada Loker Informasi untuk mendapatkan informasi (penjelasan) terkait dengan persyaratan izin yang dimohon, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan perizinan serta memberikan formulir pendaftaran;



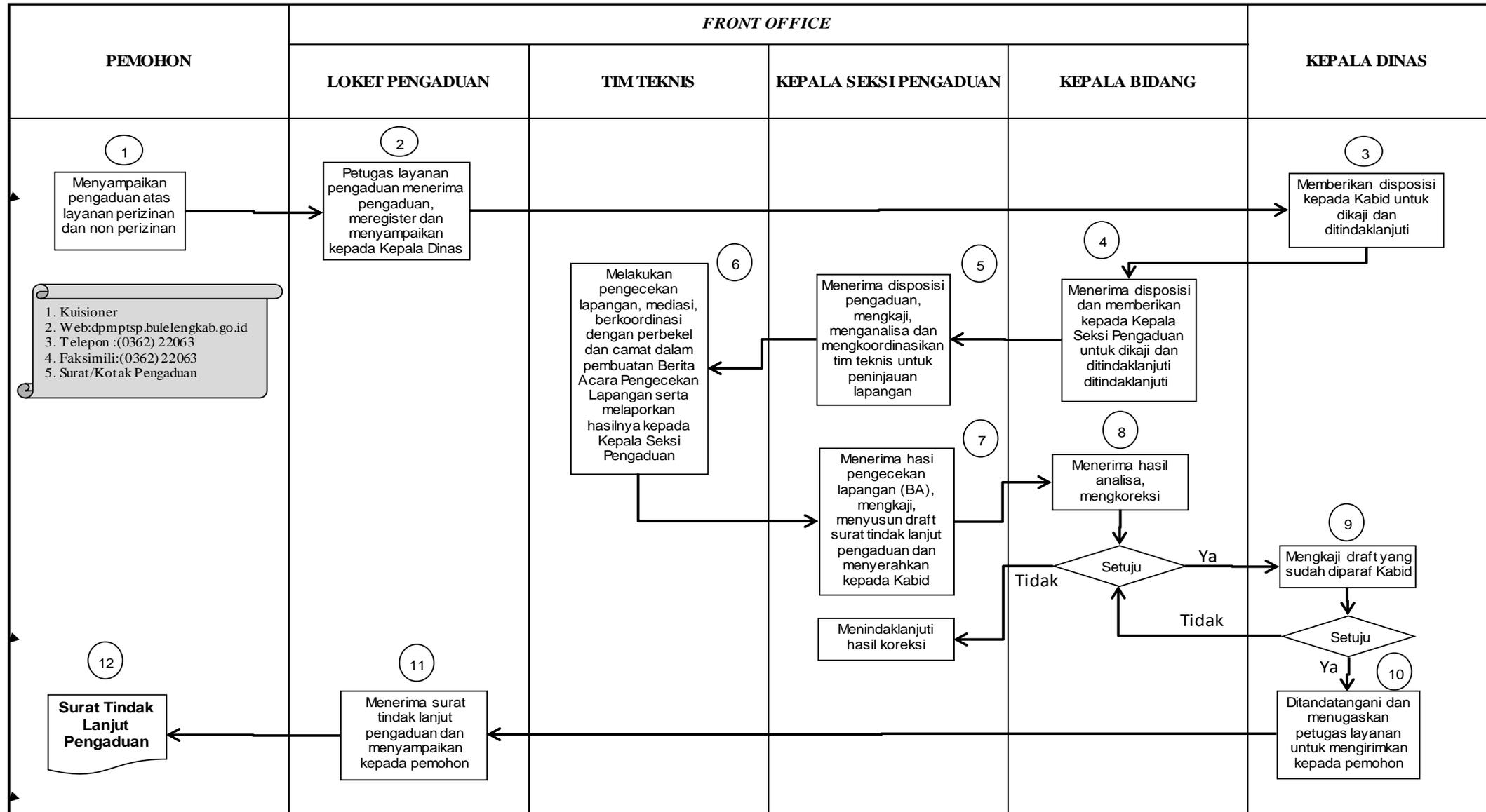
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan mengajukan atau memasukkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pelayanan A/B;
3. Petugas pelayanan menerima dan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan, jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
4. Jika persyaratan sudah lengkap prosedur selanjutnya adalah petugas verifikasi mengecek apakah termasuk permohonan izin baru, permohonan daftar ulang dan salinan;
5. Petugas verifikasi berkas melakukan pemeriksaan teknis terhadap berkas-berkas tersebut dan membuat surat undangan ke lapangan bagi Tim Teknis dan penjadwalan pemeriksaan ke lapangan;
6. Kepala Seksi memeriksa dan memberi paraf lembar disposisi permohonan yang lengkap untuk diajukan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B untuk memohon tindak lanjut;
7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B menganalisa berkas dan mengajukan persetujuan verifikasi lapangan serta menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan Verifikasi lapangan;
8. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan
9. Tim Teknis membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan menyerahkan BAP kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B;
10. Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan A/B berkoordinasi dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B membuat surat penolakan jika hasil pemeriksaan ternyata tidak sesuai dengan peraturan (Peraturan Daerah, RTRW, RDTR dan Peraturan lainnya), kemudian diajukan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
11. Petugas verifikasi berkas membuat surat penolakan sesuai hasil pemeriksaan Tim Teknis dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon;
12. Jika hasil pemeriksaan lapangan sudah sesuai maka permohonan perizinan disetujui berdasarkan BAP oleh Tim Teknis, petugas akan mencetak konsep izin dan melakukan perhitungan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) sebagai dasar pembayaran Retribusi di Loket Pembayaran dan Kasir;
13. Setelah pemohon menyerahkan SKRD/SKPD dan melakukan pembayaran pada loket pembayaran/kasir maka pemohon akan diberikan bukti pembayaran.
14. Berdasarkan SKRD/SKPD, petugas pencetakan izin akan melakukan penomoran dan pencetakan izin,;
15. Selanjutnya izin yang sudah dicetak dikoreksi dan diparaf oleh Kepala Seksi

16. Izin yang sudah dicetak juga dikoreksi dan diparaf oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/B
17. Setelah paraf dari Kepala Seksi dan Kepala Bidang lengkap baru izin diajukan ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk ditandatangani;
18. Loker Penyerahan Izin pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan akan meregister izin yang terbit dan menyerahkan kepada pemohon;
19. Izin diterima oleh pemohon sesuai dengan jenis izin yang diajukan;
20. Semua jenis perizinan yang telah diterbitkan, selanjutnya berkasnya disimpan pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai bagian dari Dokumen Negara;
21. Laporan data izin yang diterbitkan dan pengaduan masyarakat selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi layanan perizinan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Gambar 1.2 berikut adalah alur/skema pengurusan permohonan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng.



Gambar 1.2 Alur/Skema Pengurusan Permohonan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng



Gambar 1.3 Alur/Skema Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

1.4. Isu Strategis

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal dapat diuraikan sebagai berikut.

1.4.1. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat berupa kekuatan (*strengths*) dan ada yang berupa kelemahan (*weaknesses*). Faktor kekuatan dan kelemahan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis yang merupakan faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penanaman modal;
- b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perijinan sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- c. Sudah adanya *masterplan* wilayah dalam kaitannya dengan penentuan titik pemasangan papan reklame;
- d. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan Tupoksi di antaranya:
 - 1) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 2) Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;
- 3) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Isu strategis yang merupakan faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga di bidang teknis;
- b. Disiplin dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas masih rendah;
- c. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan terutama sarana dan prasarana gedung kantor dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- e. Penyediaan data terkait dengan potensi investasi belum akurat sehingga promosi yang dilaksanakan juga belum maksimal, hal ini berimbas pada belum maksimalnya investasi dari investor;
- f. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal.

1.4.2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, Isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Adapun faktor peluang dan faktor ancaman dimaksud adalah:

1. Peluang (*Opportunities*)

Isu strategis faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara profesional.



- b. Penerapan Pelayanan Perijinan berbasis IT.
- c. Berkembangnya jumlah pengusaha dan investor ke Kabupaten Buleleng.
- d. Pelayanan terhadap layanan investasi sudah membaik namun masih terkendala oleh menurunnya perkembangan ekonomi nasional sehingga perlu ditingkatkan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- e. Peningkatan status Lembaga dari Badan menjadi Dinas.

2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Isu strategis yang merupakan faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD Dinas. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus ijin dan melakukan investasi misalnya masih adanya investor yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kegiatan perusahaannya sehingga monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan masih belum optimal;
- b. Belum adanya obyektivitas yang diberikan oleh masyarakat dalam memberikan penilaian dalam Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja. Namun demikian, sebelum diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja, terlebih dahulu diuraikan perencanaan pembangunan terutama yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena perjanjian kinerja mengacu kepada RPJMD dan bertujuan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan yang termuat dalam RPJMD.

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai instansi yang bernaung di bawah Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal agar pelaksanaan kegiatannya dapat sejalan dengan RPJMD, renstra 2012-2017 dan perkembangannya dari tahun ke tahun dapat diukur dengan jelas.

2.1.1 Pernyataan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI,
SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN
TRI HITA KARANA**

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Mandiri**, mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. **Sejahtera**, mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Saing**, mengandung makna Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

2.1.2 Pernyataan Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi Pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas.
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah.
3. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral.
4. Menumbuhkan sinergi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan pembangunan.
5. Pelestarian budaya bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat.
6. Memperkuat dimensi keadilan disemua bidang.
7. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (*sustainable development*)

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut di atas maka dalam rangka mewujudkan misi yang ke-1 yaitu “Akselerasi Pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas”. Untuk mendukung misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mengusung misi yaitu:

1. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing
2. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan sesuai Asas-asas Pelayanan Publik

Misi Pertama menunjukkan suatu keinginan untuk memberikan dukungan pada pemerintah kabupaten bagi pengembangan daerah secara umum khususnya pada bidang penanaman modal dengan cara melakukan promosi, kerjasama investasi

yang sebanyak-banyaknya, monitoring terhadap investor sehingga jumlah investasi di Kabupaten Buleleng akan semakin meningkat.

Misi Kedua menunjukkan adanya keinginan untuk memberikan pelayanan prima bagi perusahaan yang membutuhkan legalitas usaha baik itu bidang perizinan maupun non perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mengacu pada asas-asas pelayanan publik yaitu cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.1.3 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD 2012-2017 yaitu :

1. Meningkatkan Realisasi Investasi dan Nilai Jual Potensi Investasi Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng adalah:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi dan Nilai Jual Potensi Investasi Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

2.1.5 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi komunikasi dan penerapan IT dalam Penanaman Modal dan pelayanan publik
2. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Buleleng
3. Memfasilitasi kerjasama strategis antar pengusaha
4. Mengintensifkan sumber-sumber pendapatan daerah
5. Mengevaluasi dan sosialisasi regulasi pelayanan perizinan
6. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang penanaman modal dan perizinan
7. Pelatihan pengembangan kepribadian dan kemampuan aparatur
8. Penyebarluasan informasi perizinan dan penanaman modal

2.1.6 Arah Kebijakan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan pula, dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan beberapa kebijakan antara lain:

1. Terwujudnya kemudahan prosedur penanaman modal melalui penyederhanaan persyaratan dan pengembangan IT dalam sistem pelayanan
2. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penanaman modal
3. Terwujudnya kerjasama strategis antar pengusaha
4. Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah
5. Mengadakan survey kepuasan dan penanganan pengaduan masyarakat
6. Terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat dan transparan
7. Meningkatnya kemampuan dan kepribadian aparatur
8. Terselenggaranya penyebaran informasi perizinan

2.1.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan terdiri dari program dan kegiatan penunjang dan urusan wajib yang dilaksanakan selama rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2012-2017.

1) Program dan Kegiatan Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - l. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah/Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 8 kegiatan yaitu:
 - a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - h. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
 - i. Penataan Halaman Gedung /Lingkungan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
 - a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - d. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6. Program Perencanaan Anggaran SKPD terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Penyusunan Anggaran SKPD
7. Program Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan

Program Wajib yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2012-2017 yaitu :

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

- b. Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - c. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
 - d. Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal
 - e. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
9. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi terdiri dari 6 kegiatan yaitu:
- a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
 - b. Kajian Kebijakan Penanaman Modal
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal
 - d. Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal
10. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana terdiri dari 1 kegiatan yaitu:
- a. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi
11. Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 5 kegiatan yaitu:
- a. Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan
 - b. Evaluasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan
 - c. Pengendalian dan Penerbitan Perizinan
 - d. Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan
 - e. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
 - f. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu
 - g. Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
 - h. Penataan Informasi dan Berkas Perizinan
 - i. Pelayanan Perizinan, Retribusi dan Pengelolaan Register
 - j. Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perijinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan
 - k. Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perijinan Masyarakat Bidang A Urusan Pariwisata dan Badan Usaha

2.2. Indikator Penetapan Kinerja

2.2.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mengalami perubahan pada tahun 2017, di mana sebelumnya pada tahun 2016 IKU masih berbentuk Badan yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki 3 IKU yaitu, Penyelesaian Penerbitan IMB<14 Hari, Nilai IKM dan % Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan. Namun seiring dengan pelimpahan wewenang penanaman modal maka IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2017 mengalami perubahan. IKU tahun 2012-2016 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 sedangkan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2017 adalah sebagai berikut seperti tersaji pada Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012-2016

NO	KINERJA UTAMA/ <i>OUT COME</i> / TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORM/ PERHITUNGAN	TARGET				Satuan	SUMBER DATA
				2013	2014	2015	2016		
1	Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, tepat, efisien dan transparan	Penyelesaian penerbitan perijinan IMB < 14 Hari	Jumlah Ijin terbit tepat waktu / jumlah ijin terbit x 100	1.000	1.000	1.000	1.000	Ijin	BPPT
		Nilai IKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79.00	80.00	80.00	80.25	Angka/ Nilai	BPPT
		% Pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Jumlah Pengaduan terselesaikan / jumlah pengaduan keseluruhan x 100	100	100	100	100	Prosentase	BPPT

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Target 2017	Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya realisasi investasi dan nilai jual potensi investasi daerah	Laju Pertumbuhan Investasi Daerah	Prosentase	Sesuai amanah UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , Perka BKPM nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan tata cara Izin prinsip PM dan Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP RUPMK	$\left(\frac{EndingValue}{BeginningValue} \right)^{\left(\frac{1}{\#ofyear} \right)} - 1$	BPS, DPMPPTSP dan BI	64 %	Realisasi Investasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	Angka/ Nilai	Sesuai PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor.25/2009 ttg Pelayanan publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPPTSP	80.50	Nilai tertinggi dari hasil survey

2.2.1. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penetapan kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penyusunan Perjanjian mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2017, dokumen Rencana Strategis DPMPPTSP dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012-2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2012-2017, disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2012-2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Setiap Tahun										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Kinerja pada Akhir RPJMD
					2013		2014		2015		2016		2017			
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Terwujudnya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Cepat, Tepat, Efisien dan Transparan	Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari	Ijin	1.000	1.000	1.336	1.000	1.055	1.000	1.106	1.000	1.385	1.000	2.817	5.000	7.699
		% Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan	Prosentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/Angka	79.00	79,00	80,23	80,00	79,75	80,00	80,25	80,25	80,26	80,50	80,60	80,50	80,60
3.	Meningkatnya realisasi investasi dan nilai jual potensi investasi daerah	Laju Pertumbuhan Investasi Daerah	Prosentase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	49.91	64	49.91

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran. Pada bagian ini akan diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng sesuai yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2017 sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Cepat, Tepat, Efisien dan Transparan

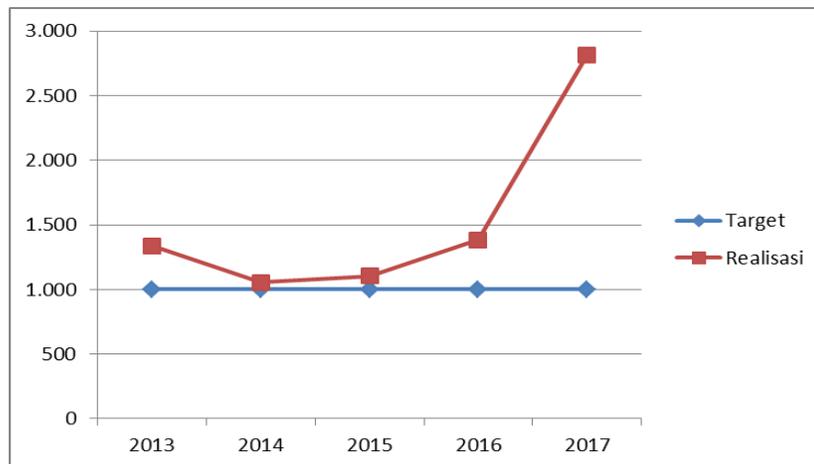
Indikator Kinerja Utama

1. Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2012-2017

Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari adalah IKU tahun 2012-2016, sedangkan pada tahun 2017 tidak digunakan sebagai IKU lagi hal ini dikarenakan

Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari sudah menunjukkan adanya kepuasan masyarakat dalam hal lamanya waktu penyelesaian izin, sehingga sudah termasuk dalam Nilai IKM. Perbandingan target Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari dengan realisasinya dari tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari Tahun 2012-2017

Secara umum berdasarkan diagram tersebut terlihat bahwa realisasi sudah melampaui target yang sudah ditentukan setiap tahunnya.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dan Beberapa Tahun Terakhir Pada tabel 3.1 terlihat perbandingan realisasi capaian dari tahun 2012-2017.

Tabel 3.1 Rekap Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari Tahun 2012-2017

Tahun	Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari		
	Target	Realisasi	%
2013	1.000	1.336	133,6
2014	1.000	1.055	105,5
2015	1.000	1.106	110,6
2016	1.000	1.385	138,5
2017	1.000	2.817	281,7
TOTAL	5.000	7.699	153,98

Tingkat capaian kinerja Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, tahun 2014 mengalami penurunan realisasi mencapai 28,1% di banding tahun 2013, sedangkan tahun 2015 mengalami kenaikan realisasi sebesar 5,1 % dibandingkan tahun 2014, tahun 2016 mengalami kenaikan lagi mencapai 27,9% jika dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan di mana mencapai 143,2% jika dibandingkan dengan tahun 2016.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Perencanaan Jangka Menengah.

Dalam perencanaan jangka menengah tahun 2012-2017 ditargetkan Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari adalah 5.000 ijin, namun pada kenyataannya

realisasi Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari dari tahun 2012-2017 sudah melampaui target RPJMD yaitu sebanyak 7.699 atau sebesar 153,98%.

d. Membandingkan dengan capaian target nasional

-

e. Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja

Terjadinya peningkatan dan penurunan realisasi terhadap target yang telah ditentukan salah satunya dikarenakan adalah adanya kebijakan pemerintah melalui rumah bersubsidi yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dan mengurus legalitas atas bangunan yang dimiliki, sehingga adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pengurusan IMB.

f. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Indikator ini didukung oleh program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Tabel 3.2 Rekap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tahun	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya		
	Target	Realisasi	%
2013	669.092.750	625.996.217	93,56
2014	716.371.500	674.041.300	94,09
2015	1.109.300.000	1.031.731.522	93,01
2016	1.011.177.855	1.006.727.488	99,56
2017	864.300.000	848.782.324	98,20
TOTAL	4.370.242.105	4.187.278.851	95,81

Pada tabel tersebut terlihat efisiensi anggaran yang digunakan dalam mendukung terlaksananya indikator Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari di setiap tahunnya. Secara total dari tahun 2012-2017 mampu efisiensi anggaran sebesar 4,19% dari anggaran total selama 5 tahun Rp. 4.370.242.105 terealisasi sebesar Rp. 4.187.278.851 dengan tingkat capaian kinerja yang melampaui target yang ditentukan ditunjukkan dengan banyaknya jumlah izin yang bisa direalisasikan selama 5 tahun.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Secara umum selama 5 tahun mampu mengefisienkan penggunaan anggaran, namun pada tahun 2015 ada kegiatan yang realisasi keuangannya masih kurang seperti data yang tersaji pada Tabel 3.18 yaitu Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan di mana target anggarannya adalah Rp. 80.740.000 mampu terealisasi Rp. 55.711.286 atau sebesar 69,00%. Hal ini dikarenakan biaya BBM dan SPPD digunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun adanya realisasi anggaran yang jauh dari target yang ditentukan tidak secara langsung mempengaruhi tingkat capaian fisik dari Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari, hal ini terbukti dengan capaian fisik pada tahun 2015 sudah melampaui target yang ditentukan dengan

persentase capaian sebesar 110,6% atau mengalami kenaikan realisasi sebesar 5,1 % dibandingkan tahun 2014.

Kesimpulan Indikator Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari:

1. Capaian Kinerja Tahun 2012-2017 dari Indikator Kinerja Utama Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari sebesar 153,98% berada di rentang 85 s/d 100, karena tingkat capaian mencapai lebih dari 00% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100 sehingga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari juga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL di mana target RPJMD yaitu 5.000 ijin selama 5 tahun dan pada kenyataannya mampu terealisasi sebanyak 7.699 ijin.

2. % Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2012-2017

Sama halnya dengan Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari, % Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan adalah IKU tahun 2012-2016, sedangkan pada tahun 2017 tidak digunakan sebagai IKU lagi karena % Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan sudah menunjukkan adanya kepuasan masyarakat dalam hal lamanya penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk baik terkait dengan pelayanan maupun hal lainnya, sehingga sudah termasuk dalam Nilai IKM. Target dari % Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan setiap tahunnya adalah 100% dan pada sampai dengan tahun 2017 realisasi capaiannya sudah mencapai 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dan Beberapa Tahun Terakhir
 Pada tabel 3.3 terlihat perbandingan realisasi capaian dari tahun 2012-2017.

Tabel 3.3 Rekap Perbandingan Capaian Kinerja Indikator % Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan Tahun 2012-2017

Tahun	% Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan		
	Target	Realisasi	%
2013	100	100	100
2014	100	100	100
2015	100	100	100
2016	100	100	100
2017	100	100	100

Di setiap tahunnya realisasi sudah bisa mencapai target sehingga menunjukkan bahwa pengaduan yang masuk sudah diselesaikan dengan baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Perencanaan Jangka Menengah.

Dalam perencanaan jangka menengah tahun 2012-2017 ditargetkan untuk indikator

% Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan adalah 100%, dan pada kenyataannya realisasi % Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan dari tahun 2012-2017 sudah bisa mencapai target yang ditentukan yaitu 100%.

d. Membandingkan dengan capaian target nasional

-

e. Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja

Tercapainya target yang telah ditentukan dikarenakan setiap pengaduan masyarakat yang masuk terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sudah bisa diselesaikan dengan baik dan menjadi masukan untuk memperbaiki kinerja untuk periode tahun selanjutnya.

f. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Indikator ini didukung oleh program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu, khususnya pada kegiatan Evaluasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan, dengan adanya pengaduan masyarakat yang masuk akan memperbaiki kinerja untuk kedepannya terkait dengan bagaimana sistem dan prosedur pelayanan melalui penyusunan SOP dan SP.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Secara umum selama 5 tahun mampu mengefisienkan penggunaan anggaran, namun pada tahun 2015 ada kegiatan yang realisasi keuangannya masih kurang seperti data yang tersaji pada Tabel 3.18 yaitu kegiatan Evaluasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan di mana dari target Rp. 60.000.000 mampu terealisasi Rp. 39.804.900 atau sebesar 66.34% hal ini dikarenakan pada tahun 2015 masih adanya transisi perubahan dari Kantor ke Badan sehingga kegiatan-kegiatan yang tersusun di DPA masih perlu disempurnakan lagi sesuai dengan tupoksi. Namun adanya realisasi anggaran yang jauh dari target yang ditentukan tidak secara langsung mempengaruhi tingkat capaian fisik dari % Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan, hal ini terbukti dengan capaian fisik pada tahun 2015 sudah mampu mencapai target yang telah ditentukan.

Kesimpulan Indikator % Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan :

1. Capaian Kinerja Tahun 2012-2017 dari Indikator Kinerja Utama % Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan sebesar 100% berada di rentang 85 s/d 100, sehingga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama % Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan juga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL di mana target RPJMD yaitu 100% selama 5 tahun dan pada kenyataannya mampu terealisasi 100%.



Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Indikator Kinerja Utama

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

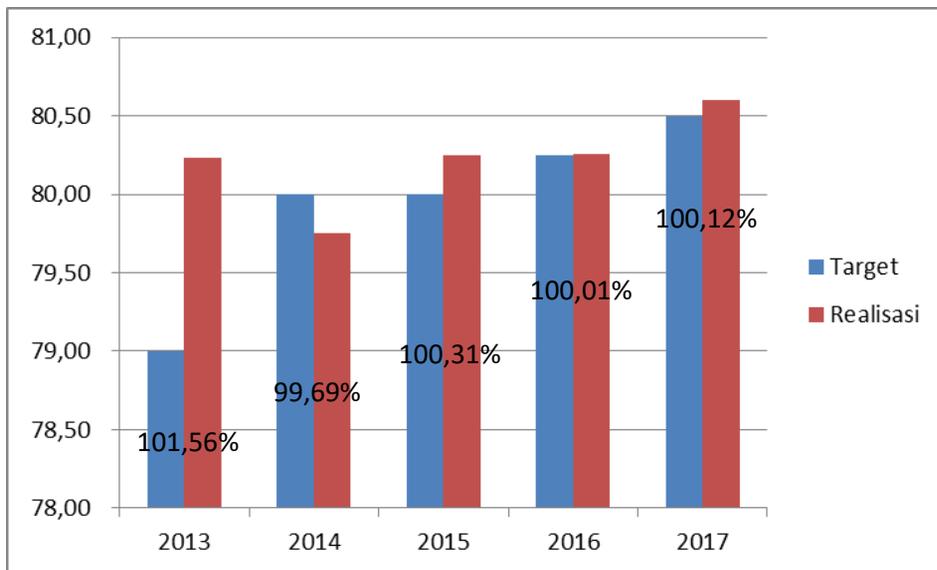
Nilai IKM merupakan IKU dari tahun 2012-2017, perbandingan antara target dan realisasi Nilai IKM dari tahun 2013-2017 terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Data IKM Tahun 2012-2017

Tahun	Nilai IKM	
	Target	Realisasi
2013	79.00	80.23
2014	80.00	79.75
2015	80.00	80.25
2016	80.25	80.26
2017	80.50	80.60

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2012-2017

Perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2012-2016 disajikan pada diagram berikut.



Gambar 3.2 Diagram Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai IKM Tahun 2012-2017

Dari diagram tersebut dapat terlihat bahwa pada secara umum realisasi sudah melampaui target yang sudah ditentukan, hanya pada tahun 2014 realisasi belum mencapai target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012-2017 dengan Perencanaan Jangka Menengah

Kondisi akhir Nilai IKM pada target RPJMD 2012-2017 adalah 80,50, dan sudah terealisasi sebesar 80,60. Detail perbandingan nilai IKM tahun 2012-2017 terhadap target RPJMD terlihat pada Tabel 2.3.

d. Membandingkan dengan capaian target nasional

-

e. Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja nilai IKM selama 5 tahun berjalan yaitu tahun 2012-2017 secara umum sudah melampaui target yang telah ditentukan. Hanya pada tahun 2014 belum mencapai target di mana dari target 80,00 tercapai sebesar 79,75, hal ini dikarenakan berdasarkan hasil survey yang dilakukan yang melibatkan 150 respon dengan penilaian terhadap 4 unsur pelayanan diperoleh hasil bahwa nilai bobot terendah yaitu pada kemampuan petugas pelayanan sebesar 2,51%, hal ini menjadi masukan dalam hal penempatan petugas yang memiliki skill dan ketrampilan sesuai dengan bidang dan keahliannya sehingga diharapkan dapat mendukung aktivitas pelayanan masyarakat dan meningkatkan kualitas kinerja. Sedangkan tercapainya target kinerja pada akhir RPJMD di mana ditargetkan nilai IKM adalah 80,50 mampu direalisasikan 80,60 yang diperoleh dari penilaian oleh 200 orang pemohon sebagai responden terhadap beberapa unsur pelayanan dalam mengurus ijin. Penilaian yang dilakukan menunjukkan kinerja “Sangat Baik” atas unsur pelayanan “penanganan pengaduan, saran dan masukan”. Penilaian kinerja “Baik” dengan nilai paling rendah terhadap unsur pelayanan “sarana dan prasarana” sehingga perlu adanya perbaikan dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada, dan pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

f. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Indikator ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu khususnya pada kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan. Selama 5 tahun dari tahun 2012-2017 mampu mengefisiensikan anggaran dari target 133.674.750 mampu terealisasi 121.830.010 atau mampu diefisiensi sebesar 8,86%.

Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2012-2017

Tahun	Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat			
	Target	Realisasi	Persentase	Efisiensi
2013	1.605.000	1.600.000	99,69	0,31
2014	15.884.500	15.600.000	98,21	1,79
2015	35.000.000	27.114.070	77,47	22,53
2016	21.185.250	21.185.190	100,00	0,00
2017	60.000.000	56.330.750	93,88	6,12
TOTAL	133.674.750	121.830.010	91,14	8,86

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program/Kegiatan ini didukung oleh Kegiatan Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan, tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan capaian pada akhir RPJMD



mencapai 80,60 dari target 80,50 sehingga pelayanan termasuk dalam kategori “Baik”.

Kesimpulan Sasaran 2 :

1. Capaian Kinerja Tahun 2017 dari Indikator Kinerja Utama Nilai IKM sebesar 100.12%. karena angka capaian kinerja pada akhir RPJMD mencapai lebih dari 100% maka termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100 sehingga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama Nilai IKM di mana target RPJMD 2012-2017 adalah 80,50 dan pada akhir RPJMD sudah terealisasi 80,60 sehingga masuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Sasaran 3 :Meningkatnya Realisasi Investasi dan Nilai Jual Potensi Investasi Daerah

Indikator Kinerja Utama

1. Laju Pertumbuhan Investasi Daerah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2012-2017

Target investasi pada tahun 2017 adalah Rp. 1.050.000.000.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Miliar Rupiah), dan realisasinya adalah 1.092.662.246.708 (Satu Triliun Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) atau sekitar 104 %.

Tabel 3.6 Data Realisasi Investasi Tahun 2017

Triwulan	Investasi	Penggunaan Tenaga Kerja (Orang)
I	Rp. 109.759.698.365	1.616
II	Rp. 248.680.378.313	567
III	Rp. 415.437.980.000	947
IV	Rp. 318.784.190.030	633
TOTAL	Rp. 1.092.662.246.708	3.763

Namun jika dihitung laju pertumbuhan investasi daerah melibatkan target dan realisasi dari tahun 2012-2017 dari 64% dapat tercapai sebesar 49,91% dengan tingkat capaian 77,98%. Nilai ini diperoleh dari formulasi/cara pengukuran *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sesuai yang tercantum pada IKU yang dihitung dari realisasi investasi mulai dari tahun 2012-2017.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Beberapa Tahun Terakhir

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng baru menangani urusan penanaman modal pada tahun 2017 sehingga data investasi dari tahun 2012-2016 diperoleh dari Ekbang yang sebelumnya menangani

urusan penanaman modal.

Tabel 3.7 Data Realisasi Investasi Tahun 2012-2017

Tahun ke	Tahun	Investasi	Penggunaan Tenaga Kerja (Orang)
0	2012	Rp. 144.316.539.250	1.430
1	2013	Rp. 75.505.000.000	435
2	2014	Rp. 263.125.478.000	1.337
3	2015	Rp. 10.042.866.236.716	1.852
4	2016	Rp. 1.041.870.243.000	1.215
5	2017	Rp. 1.092.662.246.708	3.763
CAGR		49,91 %	

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Perencanaan Jangka Menengah.

Rencana kinerja jangka menengah adalah 64 %. Target pada tahun 2017 adalah 64 % dapat tercapai sebesar 49,91% sehingga tingkat capaian kinerja ntuk indikator Laju Pertumbuhan Investasi Daerah adalah sebesar 77.98%.

- d. Membandingkan dengan capaian target nasional

-

- e. Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2017

Nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017 sudah melebihi dari target yang ditentukan di mana target yang ditentukan adalah Rp. 1.050.000.000.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Miliar Rupiah), dan realisasinya adalah 1.092.662.246.708 (Satu Triliun Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) atau sekitar 104 %.

Tabel 3.8 Data Realisasi Investasi Tahun 2017

No	Lapangan Usaha	Jumlah	%
1	Real Estate	468.279.560.000,00	43
2	Perdagangan Besar	20.000.000.000,00	2
3	Jasa Pendidikan	46.892.500.000,00	4
4	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288.251.000.000,00	26
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	102.450.000.000,00	9
6	Minimarket	53.486.222.222,00	5
7	Industri Pengolahan	45.799.220.000,00	4
8	Informasi dan Komunikasi	9.183.744.486,00	1
9	Transportasi dan Pergudangan	29.870.000.000,00	3
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.450.000.000,00	3
TOTAL		1.092.662.246.708,00	100

Sumber data: dpmpmsp.bulelengkab.go.id/profil/data-bidang-dalak-info-pm-35

Pelampauan target realisasi nilai investasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017 disebabkan karena terjadi peningkatan investasi pada lapangan usaha Rel Estate



dengan nilai investasi sebesar Rp. 468.279.560,00 atau sebesar 43% dari total investasi yang masuk. Peningkatan investasi pada sector real estate didorong oleh kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam kepemilikan rumah sederhana melalui program rumah bersubsidi.

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) program bidang penanaman modal yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, pada program ini mampu di efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,16% yaitu dengan capaian sebesar Rp. 668.587.506,00 dari anggaran sebesar Rp. 683.320.000,00. Program kedua yaitu Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, pada program ini mampu di efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,26% yaitu dengan capaian sebesar Rp. 104.588.462,00 dari anggaran sebesar Rp. 107.000.000,00 serta program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, pada program ini mampu di efisiensi penggunaan anggaran sebesar 2,59% yaitu dengan capaian sebesar Rp. 501.861.593,00 dari anggaran sebesar Rp. 515.200.000,00.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program/kegiatan ini didukung oleh Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal, Kajian Kebijakan Penanaman Modal, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal, dan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dengan kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi dan program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal dan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal. Dari program dan kegiatan tersebut yang mendukung keberhasilan capaian kinerja karena hampir semua kegiatan terealisasi lebih dari 90%.

Kesimpulan Sasaran 3 :

1. Capaian Kinerja Tahun 2017 dari Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Investasi Daerah sebesar 77,98% berada di rentang 70 s/d <85 sehingga masuk dalam kategori BERHASIL.
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana jangka menengah dari Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Investasi Daerah juga masuk dalam kategori BERHASIL.



3.1.2. Capaian Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 13 (tigabelas) kegiatan realisasi capaian keuangannya rata-rata dari tahun 2013-2017 adalah 96,36% seperti pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Rekap Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2012-2017

Tahun	Keuangan			Fisik
	Target	Realisasi	%	%
2013	633.840.550	560.456.437	88,42	97.87
2014	550.023.500	534.599.374	97,20	99.13
2015	979.045.125	956.580.531	97,71	103.00
2016	727.497.918	717.525.328	98,63	107.77
2017	1.403.552.000	1.368.353.364	97,49	121.54
TOTAL	4.293.959.093	4.137.515.034	96,36	105.86

Sedangkan capaian fisiknya dari tahun 2012-2017 rata-rata sebesar 105.86%. Hampir di semua kegiatan pada program ini sudah mencapai target. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik pada tahun 2013 mencapai 979 dari target 800 surat atau sebesar 122%, pada tahun 2015 mencapai 181 dari target 850 surat atau sebesar 139%, pada tahun 2016 dari target 900 surat mampu terealisasi 1878 surat atau sebesar 209% dan pada tahun 2017 dari target 1000 Exemplar mampu terealisasi 3802 Exemplar atau sekitar 380%. Tingkat capaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang melebihi target yang telah ditentukan dikarenakan jumlah surat keluar masuk yang tidak bisa diprediksi. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari capaian fisik sudah mencapai target yang ditentukan namun dari capaian realisasi keuangannya dari tahun 2013-2017 masih tidak mencapai 100% hal ini karena kebutuhan penggunaan tiap bulannya yang tidak bisa diprediksi, hal ini juga menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan mampu berhemat dalam penggunaan sumber daya listrik, air dan telepon. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang realisasi serapan anggarannya rata-rata sudah mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2015 realisasi anggaran masih 79,29% dan pada tahun 2017 yang mencapai 77,86%, hal ini dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan untuk belanja fotocopy dan belanja cetak yaitu cetak lembar disposisi, formulir lembar surat pengantar, amplop dinas, kartu ucapan hari raya, kartu surat masuk, kartu surat keluar, blanko SPMNCR warna, dan spanduk hari-hari besar. Ada satu kegiatan pada tahun 2013 yang tingkat capaian fisik dan keuangannya masih rendah yaitu kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah/Dalam Daerah di mana dari target 216 OH hanya terealisasi 40 OH atau sebesar 19% dan dari capaian realisasi anggaran dari target Rp. 99.625.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 49.053.900 atau sebesar 49%. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya tahap perencanaan karena direncanakan kegiatan rapat yang diikuti adalah 26 OH namun undangan rapat yang masuk tidak memenuhi sesuai target yang ditentukan sehingga mengurangi tingkat keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat 9 (sembilan) kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 95.88% sedangkan untuk serapan anggaran yaitu 87.45%.

Tabel 3.10 Rekap Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2012-2017

Tahun	Keuangan			Fisik
	Target	Realisasi	%	%
2013	153.766.700	146.995.400	95,60	98,13
2014	147.210.000	145.109.900	98,57	100,00
2015	133.956.875	125.718.354	93,85	100,00
2016	77.593.351	75.988.296	97,93	93,75
2017	633.625.000	508.506.610	80,25	87,50
TOTAL	1.146.151.926	1.002.318.560	87,45	95,88

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor pada tahun 2017 tidak terealisasi karena belanja modal DED pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor mengalami gagal lelang, namun sudah bersurat kepada Badan Keuangan Daerah dan Bappeda agar dimunculkan pada anggaran perubahan tahun 2018.

3. Capaian Kinerja dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 4 (empat) kegiatan dengan capaian kinerjanya sudah mencapai 97.27% dan dari serapan anggaran sudah mencapai 97.86%.

Tabel 3.11 Rekap Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tahun 2012-2017

Tahun	Keuangan			Fisik
	Target	Realisasi	%	%
2013	10.500.000	9.378.600	89,32	93,33
2014	9.000.000	7.500.000	83,33	100,00
2015	55.500.000	55.299.500	99,64	100,00
2016	15.000.000	13.998.600	93,32	93,00
2017	88.825.000	88.823.300	100,00	100,00
TOTAL	178.825.000	175.000.000	97,86	97,27

Hampir seluruh kegiatan diprogram ini tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi hanya dilaksanakan pada tahun 2017 mengingat adanya perubahan dari Badan ke Dinas untuk lebih meningkatkan disiplin pegawai.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Sumber Daya Aparatur, capaian realisasi fisiknya adalah 100% dan dari serapan anggaran juga sudah mencapai 100%. Kegiatan ini pada tahun 2013 dan 2014 masih baru terbentuknya Kantor sehingga belum disusun dalam DPA, sedangkan pada tahun 2016 mengalami rasionalisasi anggaran sehingga anggaran menjadi Rp. 0.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 2 (dua) kegiatan yang capaian realisasi fisiknya mencapai 100% dan serapan anggarannya mencapai 96.53%. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun belum tercantum dalam DPA, pada tahun itu penyusunan laporan keuangan akhir tahun anggarannya masih dicantumkan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Tabel 3.12 Rekap Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2012-2017

Tahun	Keuangan			Fisik
	Target	Realisasi	%	%
2013	10.150.000	9.830.000	96,85	100,00
2014	23.585.000	18.485.000	78,38	100,00
2015	38.050.000	37.210.800	97,79	100,00
2016	46.770.000	46.649.950	99,74	100,00
2017	94.990.000	93.950.100	98,91	100,00
TOTAL	213.545.000	206.125.850	96,53	100,00

6. Capaian Kinerja pada Program Penyusunan Anggaran SKPD, dengan kegiatan Penyusunan Anggaran SKPD, telah mampu direalisasi sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 99,48%.

Tabel 3.13 Rekap Capaian Program Penyusunan Anggaran SKPD Tahun 2012-2017

Tahun	Keuangan			Fisik
	Target	Realisasi	%	%
2013	23.150.000	23.150.000	100,00	100,00
2014	29.910.000	29.110.000	97,33	100,00
2015	75.500.000	75.211.470	99,62	100,00
2016	84.020.000	83.796.130	99,73	100,00
2017	100.000.000	99.682.710	99,68	100,00
TOTAL	312.580.000	310.950.310	99,48	100,00

7. Program Informasi Pembangunan Daerah capaian kinerja sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 99,97%. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan pada tahun 2015 tidak dicantumkan dalam DPA.

Tabel 3.14 Rekap Capaian Program Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2012-2017

Tahun	Keuangan			Fisik
	Target	Realisasi	%	%
2013	30.000.000	24.999.000	83,33	100,00
2014	5.400.000	5.000.000	92,59	100,00
2015	-	-	-	-
2016	20.998.000	20.998.000	100,00	100,00
2017	20.000.000	19.995.410	99,98	100,00
TOTAL	76.398.000	70.992.410	92,92	100,00

8. Ada 3 (tiga) program terkait dengan penanaman modal yang mana hanya ada di tahun 2017 karena dengan adanya transisi dari Badan ke Dinas adanya penambahan urusan di Bidang Penanaman Modal sehingga baru disusun program-program yang menunjang urusan di bidang Penanaman Modal yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 97,41%. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah untuk realisasi fisik dari target 1 Kali mampu terealisasi 4 kali atau sekitar 400%. Hal ini dikarenakan urusan di bidang penanaman modal baru dilimpahkan pada tahun 2017 sehingga target yang ditentukan hanya *matchmaking* lokal (1 kali) namun pada kenyataannya terdapat undangan dari provinsi dengan jumlah anggaran yang masih mencukup sehingga terealisasi sebanyak 3 kali untuk tingkat provinsi. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dari target 4 kali penyelenggaraan promosi mampu terealisasi 7 kali atau sekitar 175%, hal ini dikarenakan jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal yang tidak dapat diprediksi baik dari tingkat provinsi maupun tingkat nasional dan masih tersedianya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan promosi tersebut. Penyelenggaraan promosi yang dilakukan antara lain di Padang (1 kali), Kupang (1 kali), Denpasar (1 kali), pameran di Surabaya (2 kali), pameran di Buleleng (1 kali) dan pameran di Jakarta (1 kali). Sedangkan untuk kegiatan Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal dari target 2 paket mampu terealisasi 7 paket atau sekitar 350%, hal ini dikarenakan kegiatan ini mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, di mana setiap penyelenggaraan promosi dengan serta merta adanya penyiapan sarana dan prasarana promosi penanaman modal. Realisasi yang melebihi target ini disebabkan karena program dan kegiatan bidang penanaman modal baru dilimpahkan pada tahun ini sehingga untuk penentuan target belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 97,84%. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi yang telah mampu direalisasi capaian kinerja fisiknya yaitu sebesar 100%, dan realisasi capaian keuangannya 97,74%. Nilai investasi pada tahun 2017 adalah Rp. 1.092.662.246.708,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) dari target 1.050.000.000.000 atau sekitar 104%.

9. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu, mencakup 11 (sebelas) kegiatan, pada dasarnya telah mencapai target dengan rata-rata pencapaian fisik yaitu sebesar 104,88% dan serapan anggarannya 95.81%.

Tabel 3.15 Rekap Capaian Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Tahun 2012-2017

Tahun	Keuangan			Fisik
	Target	Realisasi	%	%
2013	669.092.750	625.996.217	93,56	111,86
2014	716.371.500	674.041.300	94,09	101,31
2015	1.109.300.000	1.031.731.522	93,01	110,78
2016	1.011.177.855	1.006.727.488	99,56	96,67
2017	864.300.000	848.782.324	98,20	103,80
TOTAL	4.370.242.105	4.187.278.851	95,81	104,88

Kegiatan di bidang pelayanan perizinan tahun 2012-2017 dari target 30.000 ijin yang terbagi menjadi 6.000 ijin setiap tahunnya mampu terealisasi sebanyak 33.082 Ijin atau sekitar 110,27%. Secara rinci realisasi izin yang diterbitkan dari tahun 2012-2017 seperti pada tabel 3.16.

Tabel 3.16 Rekap Data Izin Terbit Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Izin Terbit		
	Target	Realisasi	%
2013	6.000 Ijin	6.467 Ijin	107.78
2014	6.000 Ijin	6.743 Ijin	112.38
2015	6.000 Ijin	7.824 Ijin	130.40
2016	6.000 Ijin	5.525 Ijin	91.02
2017	6.000 Ijin	6.587 Ijin	109.78
TOTAL	30.000 Ijin	33.082 Ijin	110.27

Untuk kegiatan Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perijinan yang dilaksanakan dari tahun 2012-2016 dan pada tahun 2017 dipecah menjadi 2 kegiatan mengingat adanya transisi dari Badan ke Dinas, yaitu kegiatan Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan dari target sebanyak 3.000 ijin, realisasi jumlah ijin yang diterbitkan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3.636 ijin, atau sekitar

121%, hal ini dikarenakan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak bisa diprediksi jumlah permohonan izin yang masuk, dari yang ditargetkan 1.000 izin untuk 2017 terealisasi sebanyak 2.817 izin. Sedangkan untuk Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perijinan Masyarakat Bidang B Urusan Pariwisata dan Badan Usaha dari target sebanyak 3.000 ijin mampu direalisasi sebanyak 2.951 Ijin atau sekitar 98%. Sehingga jumlah total izin terbit adalah 6.587 Ijin dari target 6.000 ijin pada tahun 2017.

3.2. Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan alokasi anggaran, diperoleh efisiensi pengeluaran dari tahun 2013-2014 sebagai berikut.

- a. Pada tahun 2013 sebesar 8.47% yaitu dari anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp 1.530.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.400.805.654,00 dan efisiensi pengeluaran pada belanja tidak langsung sebesar 3,54 % yaitu dari anggaran sebesar Rp 1.736.095.713,00 terealisasi sebesar Rp 1.674.655.930,00 sehingga total efisiensi belanja daerah pada tahun 2013 sebesar 5.85% dari anggaran sebesar Rp 3.266.595.713,00 terealisasi sebesar Rp 3.075.461.584,00.
- b. Pada tahun 2014 sebesar 4.57% yaitu dari anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp 1.481.500.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.413.845.574,00 dan efisiensi pengeluaran pada belanja tidak langsung sebesar 5.67 % yaitu dari anggaran sebesar Rp 1.701.689.226,00 terealisasi sebesar Rp 1.605.241.100,00 sehingga total efisiensi belanja daerah pada tahun 2014 sebesar 5.16% dari anggaran sebesar Rp 3.183.189.226,00 terealisasi sebesar Rp 3.019.086.674,00.
- c. Pada tahun 2015 sebesar 4.56% yaitu dari anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp 2.403.352.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.293.752.177,00 dan efisiensi pengeluaran pada belanja tidak langsung sebesar 4.79 % yaitu dari anggaran sebesar Rp 2.274.987.600,00 terealisasi sebesar Rp 2.165.961.936,00 sehingga total efisiensi belanja daerah pada tahun 2015 sebesar 4.67% dari anggaran sebesar Rp 4.678.339.600,00 terealisasi sebesar Rp 4.459.714.113,00.
- d. Pada tahun 2016 sebesar 0.88% yaitu dari anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp 1.983.057.124,00 terealisasi sebesar Rp 1.965.683.792,00 dan efisiensi pengeluaran pada belanja tidak langsung sebesar 3.91 % yaitu dari anggaran sebesar Rp 2.529.467.050,00 terealisasi sebesar Rp 2.430.688.005,00 sehingga total efisiensi belanja daerah pada tahun 2016 sebesar 2.57% dari anggaran sebesar Rp 4.512.524.174,00 terealisasi sebesar Rp 4.396.371.797,00.

- e. Pada tahun 2017 sebesar 4,59 % yaitu dari anggaran belanja langsung setelah perubahan sebesar Rp 4.520.812.000,00 terealisasi sebesar Rp 4.313.131.379,00 dan efisiensi pengeluaran pada belanja tidak langsung sebesar 3,49 % yaitu dari anggaran sebesar Rp 3.175.605.375,00 terealisasi sebesar Rp 3.064.642.373,00 sehingga total efisiensi belanja daerah pada tahun 2017 sebesar 4.14% dari anggaran sebesar Rp 7.696.417.375,00 terealisasi sebesar Rp 7.377.773.752,00.

Untuk lebih jelasnya, rekap realisasi anggaran belanja daerah tahun 2013-2017 seperti yang tersaji pada tabel 3.17, dan rekap realisasi anggaran program dan kegiatan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.18 serta realisasi rekap capaian kinerja kegiatan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.17 Rekap Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013-2017

No	Jenis Belanja	2013			2014			2015			2016			2017		
		Anggaran Perubahan	Realisasi	%												
I	Belanja Tidak Langsung	1.736.095.713	1.674.655.930	96,46	1.701.689.226	1.605.241.100	94,33	2.274.987.600	2.165.961.936	95,21	2.529.467.050	2.430.688.005	96,09	3.175.605.375	3.064.642.373	96,51
	1. Belanja Pegawai	1.736.095.713	1.674.655.930	96,46	1.701.689.226	1.605.241.100	94,33	2.274.987.600	2.165.961.936	95,21	2.529.467.050	2.430.688.005	96,09	3.175.605.375	3.064.642.373	96,51
II	Belanja Langsung	1.530.500.000	1.400.805.654	91,53	1.481.500.000	1.413.845.574	95,43	2.403.352.000	2.293.752.177	95,44	1.983.057.124	1.965.683.792	99,12	4.520.812.000	4.313.131.379	95,41
	1. Belanja Pegawai	166.320.000	160.980.000	96,79	162.580.000	149.920.000	92,21	239.490.000	236.820.000	98,89	314.315.000	313.529.000	99,75	515.951.000	509.791.000	98,81
	2. Belanja Barang/Jasa	1.257.992.800	1.137.725.154	90,44	1.237.420.000	1.183.839.574	95,67	2.057.112.000	1.951.633.267	94,87	1.644.742.124	1.628.455.292	99,01	3.443.986.000	3.366.004.979	97,74
	3. Belanja Modal	106.187.200	102.100.500	96,15	81.500.000	80.086.000	98,27	106.750.000	105.298.910	98,64	24.000.000	23.699.500	98,75	560.875.000	437.335.400	77,97
	Total	3.266.595.713	3.075.461.584	94,15	3.183.189.226	3.019.086.674	94,84	4.678.339.600	4.459.714.113	95,33	4.512.524.174	4.396.371.797	97,43	7.696.417.375	7.377.773.752	95,86

Sumber data :Laporan Keuangan 2012-2016 dan LRA Tahun 2017



Gambar 3.3 Grafik Target, Realisasi dan Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012-2017

Tabel 3.18 Rekap Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2013-2017

TARGET DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2013-2017

Program dan Kegiatan		Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	633.840.550	560.456.437	88	550.023.500	534.599.374	97	979.045.125	956.580.531	97,71	727.497.918	717.525.328	98,63	1.403.552.000	1.368.353.364	97,49	
	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54.533.100	53.333.100	98	33.600.000	33.600.000	100	33.100.000	32.162.500	97,16	37.600.000	37.518.000	99,78	40.000.000	39.319.000	98,29
	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.841.775	18.702.916	72	28.813.300	25.163.774	87	33.002.000	27.563.361	83,52	36.502.000	28.283.284	77,48	55.000.000	42.627.294	77,50
	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.000.000	72.758.065	93	78.000.000	78.000.000	100	195.600.000	195.600.000	100,00	165.600.000	165.526.016	99,95	170.000.000	169.822.000	99,89
	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	1.800.000	1.614.000	89	3.000.000	2.583.000	86,10	3.000.000	2.859.600	95,32	5.200.000	3.411.900	65,61
	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	137.983.800	131.956.256	96	85.925.000	83.625.000	97	130.076.000	129.392.400	99,47	127.449.000	127.249.000	99,84	217.725.000	216.886.200	99,61
	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.272.200	36.272.200	100	52.696.200	52.696.200	100	86.400.000	86.381.290	99,97	98.400.000	98.381.840	99,98	98.500.000	98.480.730	99,98
	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	126.709.600	126.709.600	100	136.854.800	136.854.800	100	245.109.725	242.693.660	99,01	179.769.678	179.769.678	100,00	224.992.000	222.551.525	98,91
	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.250.000	6.250.000	100	14.321.200	13.121.200	91	26.397.400	20.931.410	79,29	14.000.000	13.748.870	98,20	18.200.000	14.172.131	77,86
	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	1.108.000	1.108.000	100	3.000.000	2.970.000	99,00	2.999.040	2.999.040	100,00	5.746.350	5.738.260	99,85
	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.794.675	57.150.000	97	47.500.000	47.050.000	99	106.750.000	105.298.910	98,64	24.000.000	23.699.500	98,74	369.075.000	357.318.900	96,81
	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.840.000	2.905.000	76	4.500.000	3.120.000	69	3.360.000	3.360.000	100,00	4.120.000	4.020.000	97,57	6.000.000	5.940.000	99,00
017	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.990.400	5.365.400	90	4.825.000	4.825.000	100	16.750.000	15.174.000	90,59	5.352.000	5.345.900	99,88	17.200.000	17.095.510	99,39	

	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	99.625.000	49.053.900	49	60.080.000	53.821.400	89	96.500.000	92.470.000	95,82	28.706.200	28.124.600	97,97	175.913.650	174.989.914	99,47
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		153.766.700	146.995.400	96	147.210.000	145.109.900	99	133.956.875	125.718.354	93,85	77.593.351	75.988.296	97,93	633.625.000	508.506.610	80,25
	003	Pembangunan Gedung Kantor	32.597.200	32.500.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.000.000	-	-
	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	17.000.000	14.650.500	86	34.000.000	33.036.000	97	-	-	-	-	-	-	67.500.000	63.751.500	94,44
	012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	47.450.000	46.450.000	98	49.560.000	48.940.000	98	54.500.000	53.254.110	97,71	30.000.000	29.905.730	99,68	76.000.000	73.934.420	97,28
	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.800.000	99	15.000.000	14.690.000	98	25.000.000	23.000.000	92,00	-	-	-	-	-	-
	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	26.419.500	23.364.900	88	38.150.000	37.943.900	99	39.956.875	35.541.984	88,95	42.893.351	41.582.716	96,94	58.000.000	55.430.720	95,57
	026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	100,00	6.125.000	5.549.970	90,61
	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.300.000	10.230.000	99	10.500.000	10.500.000	100	14.500.000	13.922.260	96,01	1.700.000	1.499.850	88,22	10.000.000	7.524.000	75,24
	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.000.000	203.316.000	97,74
	048	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	99.000.000	99,00
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		10.500.000	9.378.600	89	9.000.000	7.500.000	83	55.500.000	55.299.500	99,64	15.000.000	13.998.600	93,32	88.825.000	88.823.300	99,99
	001	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.700.000	7.700.000	100,00
	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.500.000	9.378.600	89	9.000.000	7.500.000	83	10.500.000	10.499.500	99,99	15.000.000	13.998.600	93,32	-	-	-
	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000.000	16.998.300	99,99
	006	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	-	-	-	-	-	-	45.000.000	44.800.000	99,55	-	-	-	64.125.000	64.125.000	100,00

05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000		-	-		10.000.000	10.000.000	100,00	
	003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	100,00	-	-	-	10.000.000	10.000.000	100,00	
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		10.150.000	9.830.000	97	23.585.000	18.485.000	78	38.050.000	37.210.800	97,79	46.770.000	46.649.950	99,74	94.990.000	93.950.100	98,90
	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.150.000	9.830.000	97	23.585.000	18.485.000	78	27.050.000	26.510.800	98,00	28.000.000	27.880.000	99,57	57.000.000	56.010.700	98,26
	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	11.000.000	10.700.000	97,27	18.770.000	18.769.950	99,99	37.990.000	37.939.400	99,86
07	Program Perencanaan Anggaran SKPD		23.150.000	23.150.000	100	29.910.000	29.110.000	97	75.500.000	75.211.470	99,62	84.020.000	83.796.130	99,73	100.000.000	99.682.710	99,68
	001	Penyusunan Anggaran SKPD	23.150.000	23.150.000	100	29.910.000	29.110.000	97	75.500.000	75.211.470	99,61	84.020.000	83.796.130	99,73	100.000.000	99.682.710	99,68
08	Program Informasi Pembangunan Daerah		30.000.000	24.999.000	83	5.400.000	5.000.000	93	-	-	-	20.998.000	20.998.000	100,00	20.000.000	19.995.410	99,97
	001	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	30.000.000	24.999.000	83	5.400.000	5.000.000	93	-	-	-	20.998.000	20.998.000	100,00	20.000.000	19.995.410	99,97
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.200.000	501.861.593	97,41	
	001	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.500.000	86.940.118	99,36	
	013	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.700.000	188.253.550	93,79	
	014	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.260.000	121.176.590	99,93	
	018	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.740.000	105.491.335	99,76	

16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683.320.000	668.587.506	97,84	
	005	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.600.000	65.345.750	96,66	
	007	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.100.000	164.320.856	98,92	
	009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.900.000	91.429.650	95,33	
	012	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.520.000	46.397.000	97,63	
	013	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.000.000	250.970.650	98,80	
	014	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.200.000	50.123.600	96,02	
17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.000.000	104.588.462	97,74	
	001	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.000.000	104.588.462	97,74	
18	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu		669.092.750	625.996.217	94	716.371.500	674.041.300	94	1.109.300.000	1.031.731.522	93,01	1.011.177.855	1.006.727.488	99,56	864.300.000	848.782.324	98,20
	001	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan	235.091.000	221.539.650	94	353.152.000	322.291.700	91	471.800.000	457.402.508	96,94	446.454.760	445.535.933	99,79	-	-	-
	002	Evaluasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan	-	-	-	50.000.000	49.800.000	100	60.000.000	39.804.900	66,34	71.395.750	69.553.250	97,41	-	-	-
	003	Pengendalian dan Penerbitan Perizinan	72.335.000	71.976.300	100	88.760.000	88.754.900	100	119.000.000	115.697.442	97,22	129.799.400	129.332.130	99,64	-	-	-
	004	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	50.355.000	46.794.000	93	13.580.000	12.965.000	95	80.740.000	55.711.286	69,00	40.121.595	40.121.595	100,00	50.000.000	48.456.580	96,91



	005	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	121.100.000	98.602.200	81	14.400.000	12.250.000	85	60.000.000	55.374.576	92,29	16.440.350	16.440.350	100,00	-	-	-
	006	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	-	-	-	71.800.000	64.510.950	90	96.760.000	96.287.240	99,51	120.848.750	119.869.540	99,18	141.800.000	137.714.620	97,11
	007	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	1.605.000	1.600.000	100	15.884.500	15.600.000	98	35.000.000	27.114.070	77,46	21.185.250	21.185.190	99,99	60.000.000	56.330.750	93,88
	008	Penataan Informais dan Berkas Perizinan	82.611.250	79.488.567	96	43.820.000	42.893.750	98	65.000.000	64.992.000	99,98	53.172.000	53.172.000	100,00	-	-	-
	009	Pelayanan Perizinan, Retribusi dan Pengelolaan Register	105.995.500	105.995.500	100	64.975.000	64.975.000	100	121.000.000	119.347.500	98,98	111.760.000	111.517.500	99,78	-	-	-
	010	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.000.000	334.377.974	98,92
	011	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.500.000	271.902.400	99,05
	TOTAL		1.530.500.000	1.400.805.654	91,53	1.481.500.000	1.413.845.574	95,43	2.403.352.000	2.293.752.177	95,44	1.983.057.124	1.965.683.792	99,12	4.520.812.000	4.313.131.379	95,40

Tabel 3.19 Rekap Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2013-2017

TARGET DAN REALISASI FISIK TAHUN 2013-2017

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				97,87			99,13			103,00			107,77			121,54
001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasi tepat waktu	800 Surat	979 Surat	122	800 Surat	789 Surat	98,63	850 Surat	1181 Surat	139	900 Surat	1878 Surat	209	1000 Eksamplar	3802 Examplar	380
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik dibayar tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	100	60 RB	60 RB	100	12 Bulan	12 Bulan	100	3 Jenis	3 Jenis	100	41 Rekening Kantor	41 Rekening Kantor	100
003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	100	12 MB	12 MB	100	12 Bulan	12 Bulan	100	2 Unit	2 Unit	100	24 MB	24 MB	100
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	-	-	-	8 Unit	8 Unit	100	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	12 Unit	92	17 Unit	17 Unit	100
007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	100 SPM	136 SPM	136	5 Laporan	5 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor tersedia tepat waktu	19 Item	19 Item	100	28 Jenis	28 Jenis	100	28 Jenis	28 Jenis	100	28 Jenis	28 Jenis	100	28 Jenis	28 Jenis	100
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	37 Item	37 Item	100	55 Jenis	55 Jenis	100	55 Jenis	55 Jenis	100	50 Jenis	50 Jenis	100	50 Jenis	50 Jenis	100
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	56 Buah	56 Buah	100	10 Jenis	10 Jenis	100	11 Jenis	11 Jenis	100	9 Jenis	9 Jenis	100	8 Jenis	8 Jenis	100
012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tepat waktu	-	-	-	10 Buah	10 Buah	100	30 Buah	30 Buah	100	24 Buah	24 Buah	100	8 Komponen	8 Komponen	100



	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	6 Unit	6 Unit	100	21 Unit	21 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100	70 Unit	70 Unit	100
	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	36 KB	36 KB	100	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	36 Rekening	36 Rekening	100
	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	5 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100
	018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti tepat waktu	216 OH	40 OH	19	50 OH	45 OH	90	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12 Bulan	12 Bulan	100	2 OH	2 OH	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					98,13			100,00			100,00			93,75			87,50
	003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	-
	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional sesuai ketentuan	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100	-	-	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100
	012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	400 Kali	355 Kali	88,75	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100	8 Jenis	8 Jenis	100	8 Jenis	8 Jenis	100
	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik	1 Unit	1 Unit	100	1 Paket	1 Paket	100	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-	-	-	-
	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dengan baik	9 Unit	9 Unit	100	4 Unit	4 Unit	100	13 Unit	13 Unit	100	4 Unit	4 Unit	100	13 Unit	13 Unit	100
	026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100	6 Unit	6 Unit	100
	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik	3 Jenis	3 Jenis	100	29 Unit	29 Unit	100	11 Unit	11 Unit	100	4 Unit	3 Unit	75	10 Unit	10 Unit	100
	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100
	048	Penataan Halaman Gedung/Lingkungan Kantor	Jumlah halaman gedung kantor yang ditata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100

03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				93,33			100,00			100,00			93,00			100,00	
	001	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100	
	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	-	-	-	30 Potong	30 Potong	100	-	-	-	30 Stel	28 Stel	93	-	-	-
	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	30 Potong	28 Potong	93	-	-	-	25 Potong	25 Potong	100	-	-	-	34 Potong	34 Potong	100
	006	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani dan budaya aparatur	-	-	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										100,00						100,00	
	003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Intensitas peningkatan SDM lebih baik	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100	-	-	-	2 OH	2 OH	100
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100			100			100			100			100	
	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi LAKIP SKPD dan Laporan Keuangan SKPD tepat waktu	10 Buku	10 Buku	100	12 Laporan	12 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	5 Laporan	100
	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Frekuensi administrasi pengelolaan keuangan yang tersedia tepat waktu	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
07	Program Perencanaan Anggaran SKPD				100			100			100			100			100	
	001	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD	26 Buku	26 Buku	100	46 Buku	46 Buku	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
08	Program Informasi Pembangunan Daerah																	
	001	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah pameran/pawai pembangunan yang diselenggarakan	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	1 Kali	100	-	-	-	1 Kali	1 Kali	100	4 Kali	4 Kali	100



15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Meningkatnya Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Investasi														
	001	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah matchmaking Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kali	4 Kali	400
	013	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Kali	7 Kali	175
	014	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang didistribusikan ke investor/masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Kali	7 Kali	350
	018	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen penyusunan strategi promosi penanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi														
	005	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen sistem informasi penanaman modal yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	007	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian penanaman modal yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah investor yang dimonitoring dan evaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Investor	100 Investor	100
	012	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Pengusaha	50 Pengusaha	100
	013	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah pemetaan titik reklame yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Sistem	1 Sistem	100
	014	Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	Persentase permasalahan penanaman modal yang terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100
17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		Peningkatan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah														
	001	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100



18	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu		Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Terpadu yang Transparan dan Akuntabel		102,62			101,35			110,90			96,18			103,91
001	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan	Jumlah berkas permohonan yang diverifikasi dan diteliti	6000 Ijin	6467 Ijin	107,78	6000 Berkas	6743 Berkas	112,38	6000 Ijin	8237 Ijin	137,28	6000 Berkas	5525	87,58	-	-	-
002	Evaluasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan evaluasi layanan yang dibuat	-	-	-	1 Buku	1 Buku	100	1 Laporan	1 Laporan	100	12 Bulam	12 Bulan	100	-	-	-
003	Pengendalian dan Penerbitan Perizinan	Jumlah permohonan izin yang diverifikasi sebelum penerbitan izin	6000 Ijin	6467 Ijin	107,78	6000 Ijin	6743 Ijin	112,38	6000 Ijin	7824 Ijin	130,40	6000 Ijin	5461 Ijin	91,02	-	-	-
004	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	10 Buku	10 Buku	100	4 Buku	3 Buku	75	4 Buku	4 Buku	100	4 Buku	4 Buku	100	4 Buku	4 Buku	100
005	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Jumlah pengembangan sistem informasi yang dilakukan	2 Kali	2 Kali	100	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	-	-	-
006	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah sosialisasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	9 Kecamatan	9 Kecamatan	100
007	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen evaluasi tingkat kepuasan masyarakat	100 Jenis Perizinan	95 Jenis Perizinan	95	1 Buku	1 Buku	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
008	Penataan Informasi dan Berkas Perizinan	Jumlah berkas permohonan perizinan yang ditata dengan baik	6000 Ijin	6467 Ijin	107,78	6000 Ijin	6743 Ijin	112	6000 Ijin	7824 Ijin	130,40	6000 Ijin	5461 Ijin	91,02	-	-	-
009	Pelayanan Perizinan, Retribusi dan Pengelolaan Register	Jumlah dokumen permohonan izin yang diregister	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	26 Dokumen	26 Dokumen	100	26 Dokumen	25 Dokumen	96	-	-	-
010	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang A Urusan Perumahan dan Lingkungan	Jumlah berkas izin urusan perumahan dan lingkungan yang diverifikasi dan diteliti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000 Ijin	3636 Ijin	121,20
011	Verifikasi dan Penelitian Berkas Permohonan Perizinan Masyarakat Bidang B Pariwisata dan Badan Usaha	Jumlah berkas izin usaha urusan pariwisata dan badan usaha yang diverifikasi dan diteliti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000 Ijin	2951 Ijin	98,37
TOTAL					117			116			104			101			118



BAB IV

PENUTUP

Dengan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab IV Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng dapat di simpulkan secara umum atas capaian kinerja serta langkah yang akan untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi selama tahun 2012-2017. Beberapa permasalahan teknis yang terjadi adalah :

- 1) Penetapan anggaran perubahan yang melalui jalur prosedur yang panjang menyebabkan pelaksanaan beberapa program yang mengalami perubahan menjadi terhambat.
- 2) Masih adanya tumpang tindih terkait tupoksi dengan instansi/SKPD lain mengingat perubahan dari Kantor ke Badan, dan dari Badan ke Dinas dengan penambahan wewenang di bidang penanaman modal, pengawasan lapangan untuk izin prinsip masih belum maksimal karena adanya tumpang tindih tupoksi, sehingga timbul permasalahan terkait dengan penerbitan izin.
- 3) Program kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng masih terkendala oleh keterbatasan personil baik di bidang teknis maupun administrasi dan keuangan. Kapasitas staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sampai akhir tahun 2017 berjumlah 34 orang termasuk pimpinan terbagi kedalam 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 12 Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Disamping tenaga PNS kami dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga honorer daerah dan 53 orang tenaga kerja kontrak, sehingga jumlah personil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Buleleng sebanyak 89 orang.
- 4) Kurangnya mobilitas darat dalam menunjang pelayanan perizinan terutama untuk survey lapangan dan kegiatan pada monitoring dan evaluasi penanaman modal.
- 5) Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan dan jumlah alokasi anggaran yang diperlukan.
- 6) Penyediaan data terkait dengan potensi investasi belum akurat sehingga promosi yang dilaksanakan juga belum maksimal, hal ini berimbas pada belum maksimalnya investasi dari investor.
- 7) Berdasarkan analisa hasil survei terakhir yang dilakukan pada tahun 2017 yang meliputi 9 unsur pelayanan, ada 3 unsur pelayanan yang diantaranya mendapatkan penilaian paling rendah dari para pengguna layanan, yaitu;



- a. Penilaian peringkat ke 9 (paling rendah), yaitu unsur Sarana dan Prasana, dengan nilai 3,0200
- b. Penilaian peringkat ke 8, yaitu unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, dengan nilai 3,0800.
- c. Penilaian peringkat ke 7, yaitu unsur Waktu Penyelesaian, dengan nilai 3,1000.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerjanya untuk tahun berikutnya antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak yang berkompeten untuk lebih mempercepat dan memperlancar proses Penetapan Anggaran Perubahan, serta perlu dicermati dalam perencanaan awal sehingga tidak terjadi program/kegiatan yang tidak bisa direalisasikan tepat waktu.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan organisasi untuk meminimalkan tumpang tindih tupoksi;
3. Mengantisipasi permasalahan secara administratif adalah membuat rencana kerja kegiatan dengan lebih realitis dan terukur, sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan dan waktu penyelesaiannya tepat waktu. Oleh karena itu perlu penghitungan dan penyesuaian kembali ukuran yang dipergunakan dalam Rencana Kerja maupun Renstra agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengukuran realisasi capaian indikator kinerja (*Outcome*).
4. Mengoptimalkan kapasitas personil yang ada walaupun harus ada yang merangkap dalam pelaksanaan tugas-tugas, serta memberi kesempatan kepada staf (administrasi keuangan maupun teknis) dalam menambah wawasan/pengetahuan melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun diklat-diklat berbasis informasi dan teknologi (IT) sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
5. Melakukan validasi data investasi secara maksimal, sehingga strategi promosi bisa ditingkatkan misalnya dengan memperluas cakupan promosi dengan pengembangan media yang menarik dan mudah digunakan.
6. Berkaitan dengan perolehan nilai terendah yang diperoleh dari survey kepuasan masyarakat tahun 2017 pada 3 unsur pelayanan tersebut, kemudian mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang riil, meliputi jumlah dan kompetensi personil, anggaran, alat kerja, serta sarana dan prasarana, maka akan dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:
 - a. Upaya perbaikan dari unsur Sarana dan Prasana yaitu melalui perbaikan dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada, dan pengadaan sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
 - b. Upaya perbaikan dari unsur Waktu Penyelesaian, yaitu melalui identifikasi hambatan-hambatan yang ada, baik di kantor maupun di lapangan, dan peningkatan pemahaman

petugas pelayanan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada serta pengawasan terhadap penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada oleh petugas.

- c. Upaya perbaikan dari unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, yaitu melalui peninjauan kembali (perbaikan) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada yang telah ditetapkan, dan melalui pembuatan sistem antri yang jelas.

Akhirnya, kesimpulan kami terhadap pencapaian target indikator kinerja yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017, setiap tahunnya dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan keterbatasan kami. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2012-2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,

I Putu Karuna, SH

Pembina Tk. I

NIP.19660602 199403 1 011



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No.72 Telepon 22063 Singaraja

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2013
KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2013 sebagaimana daftar terlampir.

Penetapan kinerja ini merupakan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2013.

Mengetahui :
Bupati Buleleng,

Singaraja, 1 Nopember 2013
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng

PUTU AGUS SURADNYANA

I PUTU KARUNA, SH
NIP. 19660602 199403 1 011

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat

Daerah

: KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BULELENG

Tahun anggaran

: 2013

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1	2	3	4		5
			42	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	669.092.750
Tersedianya data-data yang berhubungan dengan proses perijinan	Adanya BAP lokasi pemohon	6000 ijin	42.01	Verifikasi dan penelitian berkas permohonan perijinan masyarakat	235.091.000
Tersedianya data-data yang berhubungan dengan proses perijinan	Adanya dokumen ijin yang diterbitkan	6000 ijin	42.03	Pengendalian dan Penerbitan Perijinan	72.335.000
Tersedianya data-data yang berhubungan dengan proses perijinan	Adanya data pelayanan perijinan	10 Buku	42.04	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan	50.355.000
Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan	Adanya update software pelayanan perijinan	2 Kali	42.05	Pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan	121.100.000
Adanya informasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Adanya hasil pengolahan kuesioner kepada masyarakat	100 Jenis perizinan	42.07	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	1.605.000
Tersedianya data-data yang berhubungan dengan proses perijinan	Adanya arsip ijin yang telah diterbitkan	6000 ijin	42.08	Penataan informasi dan berkas perijinan	82.611.250
Tersedianya data-data yang berhubungan dengan proses perijinan	Adanya sinkronisasi data retribusi dengan ijin terbit	12 bulan	42.09	Pelayanan Perijinan, Retribusi dan Pengelolaan Register	105.995.500

Jumlah Anggaran : : Rp. 669.092.750

Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu : Rp. 669.092.750

Singaraja, 1 Nopember 2013

Menyetujui,
Bupati Buleleng,

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng

Putu Agus Suradnyana

I Putu Karuna, SH
NIP.19660602 199403 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No.72 Telepon 22063 Singaraja

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2014 sebagaimana daftar terlampir.

Penetapan kinerja ini merupakan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2014.

Mengetahui :
Bupati Buleleng,

Singaraja, 2 Januari 2014
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng

PUTU AGUS SURADNYANA

I PUTU KARUNA, SH
NIP. 19660602 199403 1 011

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2014

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Surat kedinasan	800 surat	Terlaksananya aktivitas surat menyurat	12 bulan	33.600.000
01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	Bukti pembayaran rekening	60 Rek/ Bulan	Tersedianya sarana listrik, air, telepon	12 bulan	28.800.000
01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Tersedianya sarana mobilitas kepala SKPD	Mobil dinas kepala SKPD	12 Mobil/Bulan	Tersedianya mobil dinas kepala SKPD	12 bulan	102.000.000
01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	Tersedianya legalitas kendaraan dinas	Pembayaran PKB	8 Unit	Tersedianya legalitas kendaraan dinas	8 unit	1.800.000
01.07	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	SPM	5 Laporan	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	89.925.000
01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	Terperliharnya kebersihan kantor	Alat kebersihan	28 Jenis	Terperliharnya kebersihan kantor	12 bulan	50.462.200
01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	Tersedianya alat tulis kantor	Alat tulis kantor	55 Jenis	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	123.215.200
01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	24.608.100
01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor</i>	Tersedianya kondisi penerangan yang memadai	Komponen listrik/bahan penerangan	10 buah	Adanya kondisi kerja yang memadai	12 bulan	1.108.000
01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kantor	6 Unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	6 unit	47.500.000
01.15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	Tersedianya bahan-bahan bacaan	Bahan bacaan	36 Koran/ Bulan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	4.500.000
01.17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	Tersedianya makanan dan minuman	Bahan mminuman	5 Jenis	Tersedianya makanan/minuman kantor	12 bulan	4.825.000
01.18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi	50 OH	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	45.000.000
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
02.05	<i>Pengadaan kendaraan dinas/ operasional</i>	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Sepeda motor	2 Unit	Tersedianya sarana mobilitas	2 unit	34.000.000

02.12	<i>Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/prasarana upacara</i>	Tersedianya sarana/prasarana upacara	Sarana upacara	6 Jenis	Terlaksananya persembahyangan	12 bulan	49.560.000
02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ lingkungan kantor</i>	Tersedianya sarana gedung yang memadai	Rehab gedung kantor	1 Paket	Terpeliharanya kondisi gedung/kantor	1 Paket	15.000.000
02.24	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional</i>	Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	4 Unit	Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas	12 bulan	38.150.000
02.28	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/kantor</i>	Terpeliharanya kondisi peralatan gedung/kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	29 Unit	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	12 bulan	10.500.000
03	Peningkatan Disiplin Aparatur						
03.02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Bahan Pakaian Dinas	30 Potong	Tersedianya bahan pakaian dinas beserta kelengkapannya	30 potong	9.000.000
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
06.01	<i>Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	dan keuangan	Laporan kinerja	12 Laporan	Tersedianya laporan kinerja	12 bulan	13.085.000
07.	Perencanaan Anggaran SKPD						
07.01	<i>Penyusunan anggaran SKPD</i>	Tersedianya dokumen perencanaan keuangan	Tersedianya RKA dan DPA	46 Buku	Tersedianya dokumen anggaran SKPD	4 dokumen	27.310.000
08	Informasi Pembangunan Daerah						
08.01	<i>Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan</i>	Terlaksananya pameran pembangunan	Pameran pembangunan	1 Kali	Tersosialisasikannya pelayanan perijinan kepada masyarakat	1 kali	42.100.000
42	Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu						
42.01	<i>Verifikasi dan penelitian berkas permohonan perijinan masyarakat</i>	Terlaksananya penelitian terhadap berkas permohonan ijin	Verifikasi lapangan	6000 Berkas	Terlaksananya verifikasi lapangan	12 bulan	342.652.000
42.02	<i>Evaluasi sistem dan prosedur pelayanan perijinan</i>	Terlaksananya evaluasi pelayanan perijinan	Laporan evaluasi	1 Buku	Terlaksananya evaluasi layanan	12 bulan	50.000.000
42.03	<i>Pengendalian dan Penerbitan Perijinan</i>	Terlaksananya pengendalian penerbitan ijin	Verifikasi pra penerbitan ijin	6000 Ijin	Terlaksananya pengendalian penerbitan ijin	12 bulan	88.760.000
42.04	<i>Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan</i>	Tersedianya data pelayanan perijinan	Data pelayanan perijinan	4 Buku	Tersedianya data pelayanan perijinan	12 bulan	15.060.000
42.05	<i>Pengembangan sistem informasi Pelayanan Perijinan</i>	Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan	Software perijinan dan updating data	12 Bulan	Terlaksananya pengembangan sistem informasi secara mandiri	12 Bulan	15.600.000
42.06	<i>Sosialisasi Pelayanan perijinan Terpadu</i>	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat	Iklan layanan, dialog interaktif, web	1 Tahun	Terlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan terpadu	12 bulan	49.300.000
42.07	<i>Evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan</i>	Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	1 Dokumen	Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat	80.00	15.884.500

42.08	<i>Penataan informasi dan berkas perijinan</i>	Tersedianya informasi berkas yang mudah di akses	Terealisasinya arsip, penyerahan dan pengaduan perijinan	6000 Ijin	Terselenggaranya penataan arsip dan informasi terkait arsip	6000 ijin	43.220.000
42.09	<i>Pelayanan perijinan, retribusi dan pengelolaan register</i>	Tersedianya register yang representatif	Register perijinan dan penerimaan	12 Bulan	Terlaksananya penataan register perijinan dan penerimaan secara manual	12 bulan	64.975.000

Menyetujui,
Bupati Buleleng,

PUTU AGUS SURADNYANA

Singaraja, 2 Januari 2014

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng

I PUTU KARUNA, SH
NIP.19660602 199403 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No.72 Telepon 22063 Singaraja

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagaimana daftar terlampir.

Penetapan kinerja ini sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja akhir tahun anggaran 2015.

Singaraja, 21 Januari 2015

Mengetahui :
Bupati Buleleng,

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Buleleng

PUTU AGUS SURADNYANA

I PUTU KARUNA, SH
NIP. 19660602 199403 1 011

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2015

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
			URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
01.001	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Surat kedinasan	850 surat	Terlaksananya aktivitas surat menyurat	12 bulan	54.200.000
01.002	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	Bukti pembayaran rekening	3 jenis	Tersedianya sarana listrik, air, telepon	12 bulan	36.502.000
01.003	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Tersedianya sarana mobilitas kepala SKPD	Mobil dinas kepala SKPD	2 unit	Tersedianya mobil dinas kepala SKPD	12 bulan	195.600.000
01.006	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	Tersedianya legalitas kendaraan dinas	Pembayaran PKB	13 unit	Tersedianya legalitas kendaraan dinas	13 unit	3.000.000
01.007	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	SPM	12 laporan	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	103.100.000
01.008	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	Terperliharnya kebersihan kantor	Alat kebersihan	28 jenis	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	86.400.000
01.010	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	Tersedianya alat tulis kantor	Alat tulis kantor	55 jenis	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	180.000.000
01.011	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	11 jenis	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	26.000.000
01.012	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor</i>	Tersedianya kondisi penerangan yang memadai	Komponen listrik/bahan penerangan	30 buah	Adanya kondisi kerja yang memadai	12 bulan	3.000.000
01.013	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kantor	16 unit	Tersedianya peralatan gedung kantor	16 unit	81.000.000
01.015	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	Tersedianya bahan-bahan bacaan	Bahan bacaan	3 jenis	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	5.000.000
01.017	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	Tersedianya makanan dan minuman	Bahan mminuman	5 jenis	Tersedianya makanan/minuman kantor	12 bulan	10.000.000
01.018	<i>Rapat-rapat koordinasi dan peraturan perundang-undangan konsultasi ke luar daerah</i>	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi	12 Bulan	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	125.000.000

02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
02.012	<i>Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/prasarana upacara</i>	Tersedianya sarana/prasarana upacara	Sarana upacara	6 jenis	Terlaksananya persembahyangan	12 bulan	54.500.000
02.022	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ lingkungan kantor</i>	Tersedianya sarana gedung yang memadai	Rehab gedung kantor	1 unit	Terpeliharanya kondisi gedung/kantor	1 unit	20.000.000
02.024	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional</i>	Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	13 unit	Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas	12 bulan	55.300.000
02.028	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/kantor</i>	Terpeliharanya kondisi peralatan gedung/kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	39 unit	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	12 bulan	15.000.000
03	Peningkatan Disiplin Aparatur						
03.005	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian Olahraga	35 potong	Tersedianya pakaian olah raga tertentu	35 potong	10.500.000
03.006	<i>Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur</i>	Terlaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Tirta Yatra	1 kali	Terlaksananya tirta yatra	1 kali	30.000.000
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
05.003	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	Meningkatnya Sumberdaya manusia	Bimbingan Teknis	12 laporan	Meningkatnya Sumberdaya manusia	12 bulan	34.000.000
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
06.001	<i>Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	Tersedianya dokumen kinerja	Laporan kinerja	1 laporan	Tersedianya laporan kinerja	12 bulan	34.050.000
06.004	<i>Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan	1 laporan	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	27.000.000
07.	Perencanaan Anggaran SKPD						
07.001	<i>Penyusunan anggaran SKPD</i>	Tersedianya dokumen perencanaan keuangan	Tersedianya RKA dan DPA	4 dokumen	Tersedianya dokumen anggaran SKPD	4 dokumen	78.000.000
42	Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu						
42.001	<i>Verifikasi dan penelitian berkas permohonan perijinan masyarakat</i>	Terlaksannya penelitian terhadap berkas permohonan ijin	Verifikasi lapangan	6000 berkas	Terlaksananya verifikasi lapangan	6000 berkas	451.800.000
42.002	<i>Evaluasi sistem dan prosedur pelayanan perijinan</i>	Terlaksannya evaluasi pelayanan perijinan	Laporan evaluasi	1 laporan	Terlaksannya evaluasi layanan	12 bulan	60.000.000

42.003	<i>Pengendalian dan Penerbitan Perijinan</i>	Terlaksananya pengendalian penerbitan ijin	Verifikasi pra penerbitan ijin	6000 ijin	Terlaksananya pengendalian penerbitan ijin	12 bulan	119.000.000
42.004	<i>Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perijinan</i>	Tersedianya data pelayanan perijinan	Data pelayanan perijinan	4 buku	Tersedianya data pelayanan perijinan	12 bulan	67.640.000
42.005	<i>Pengembangan sistem informasi Pelayanan Perijinan</i>	Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan	Software perijinan dan updating data	1 aplikasi	Terlaksananya pengembangan sistem informasi secara mandiri	12 bulan	60.000.000
42.006	<i>Sosialisasi Pelayanan perijinan Terpadu</i>	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat	Iklan layanan, dialog interaktif, web	12 bulan	Terlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan terpadu	12 bulan	96.760.000
42.007	<i>Evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan</i>	Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	2 dokumen	Tersedianya data tingkat kepuasan masyarakat	100 responden	35.000.000
42.008	<i>Penataan informasi dan berkas perijinan</i>	Tersedianya informasi berkas yang mudah di akses	Terealisasinya arsiping, penyerahan dan pengaduan perijinan	6000 ijin	Terselenggaranya penataan arsip dan informasi terkait arsip	6000 ijin	65.000.000
42.009	<i>Pelayanan perijinan, retribusi dan pengelolaan register</i>	Tersedianya register yang jelas dan akurat	Register perijinan dan penerimaan	26 dokumen	Terlaksananya penataan register perijinan dan penerimaan secara manual	12 bulan	121.000.000

Menyetujui,
Bupati Buleleng,

PUTU AGUS SURADNYANA

Singaraja, 21 Januari 2015

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Buleleng

I PUTU KARUNA, SH
NIP.19660602 199403 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063 Singaraja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU KARUNA, SH

Jabatan : Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Singaraja, 1 September 2016

PIHAK PERTAMA,

I PUTU KARUNA, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19660602 199403 1 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Cepat, Tepat, Efisien dan Transparan	Penyelesaian Penerbitan Perijinan IMB < 14 Hari	Ijin	1.000	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	Rp 1.011.177.855	APBD
		Angka IKM	Persen	80,25	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	Rp 1.011.177.855	APBD
		% Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	Persen	100	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	Rp 1.011.177.855	APBD

Singaraja, 1 September 2016

Bupati Buleleng,

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng

PUTU AGUS SURADNYANA, ST

I PUTU KARUNA, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 Singaraja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I PUTU KARUNA, SH

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 11 Oktober 2017

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

PUTU AGUS SURADNYANA, ST

I PUTU KARUNA, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19660602 199403 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya realisasi investasi dan nilai jual potensi investasi daerah	Laju Pertumbuhan Investasi Daerah	64	Prosentase
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai IKM	80,50	Angka/Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 683.320.000,00	APBD
2	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana	Rp 107.000.000,00	APBD
3	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 515.200.000,00	APBD
4	Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	Rp 864.300.000,00	APBD

Singaraja, 11 Oktober 2017

Bupati Buleleng,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Buleleng,

PUTU AGUS SURADNYANA, ST

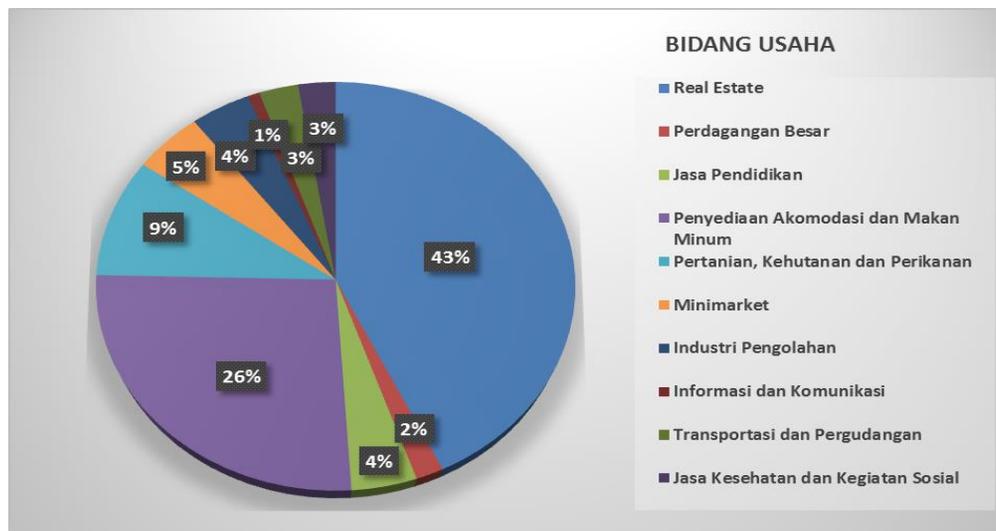
I PUTU KARUNA, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19660602 199403 1 011

Lampiran 6. Realisasi Investasi Tahun 2017

DATA REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TAHUN 2017

	Lapangan Usaha	Jumlah (Rp)	%
1	Real Estate	468.279.560.000	43
2	Perdagangan Besar	20.000.000.000	2
3	Jasa Pendidikan	46.892.500.000	4
4	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288.251.000.000	26
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	102.450.000.000	9
6	Minimarket	53.486.222.222	5
7	Industri Pengolahan	45.799.220.000	4
8	Informasi dan Komunikasi	9.183.744.486	1
9	Transportasi dan Pergudangan	29.870.000.000	3
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28.450.000.000	3
Total		1.092.662.246.708	100

GRAFIK DATA REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TAHUN 2017



PERTUMBUHAN INVESTASI KABUPATEN BULELENG

$$CAGR = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{\left(\frac{1}{\# \text{ of years}} \right)} - 1$$

Tahun ke	Tahun	Investasi
0	2012	144.316.539.250
1	2013	75.505.000.000
2	2014	263.125.478.000
3	2015	10.042.866.236.716
4	2016	1.041.870.243.000
5	2017	1.092.662.246.708
CAGR		49,91%